

JURNAL PSIKOLOGI

Teori & Terapan

Penerapan Bimbingan Kelompok Model Permainan Belajar Bersikap untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Triandriyani & Hermien Laksmiwati

Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari Tindak Kekerasan Guru terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar dari Perspektif Siswa di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey

Tamsil Muis, Muhammad Syafiq & Siti Ina Savira

Martyrdom and The Process of Radicalisation Among Young Muslims in Indonesia: Social Identity Theory Perspective

Muhammad Syafiq

Making Sense of Ethnography: From an Outsider Perspective

Siti Ina Savira

Perbandingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah

Meita Santi Budiani

Volume 1	Nomor 2	Halaman 55 - 95	Pebruari 2011	ISSN : 2087-1708
----------	---------	-----------------	---------------	------------------

JURNAL PSIKOLOGI

Teori & Terapan

Jurnal Psikologi: Teori & Terapan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Pebruari. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan ilmiah berdasarkan penelitian dan pemikiran kritis tentang berbagai isu yang berkembang dalam ranah psikologi teoritis maupun terapan.

Ketua Penyunting:

Siti Ina Savira

Penyunting Pelaksana:

Hermien Laksmiwati

Desi Nurwidawati

Muhammad Syafiq

Tata Usaha:

Musaropah

Alamat Penerbit dan Redaksi: Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya, Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya 60215
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112

Jurnal ini menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal atau media publikasi lainnya. Persyaratan bagi penulis tercantum pada halaman sampul belakang. Tulisan yang masuk akan dievaluasi dan disunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah substansinya.

JURNAL PSIKOLOGI

Teori & Terapan

DAFTAR ISI

Penerapan Bimbingan Kelompok Model Permainan Belajar Bersikap untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	55-62
Triandriyani dan Hermien Laksmiwati <i>Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Surabaya</i>	
Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari Tindak Kekerasan Guru terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar dari Perspektif Siswa di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey	63-74
Tamsil Muis, Muhammad Syafiq dan Siti Ina Savira <i>Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Surabaya</i>	
Martyrdom and The Process of Radicalisation Among Young Muslims in Indonesia: Social Identity Theory Perspective	75-81
Muhammad Syafiq <i>Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya</i>	
Making Sense of Ethnography: From an Outsider Perspective	82-87
Siti Ina Savira <i>Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya</i>	
Perbandingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah	88-95
Meita Santi Budiani <i>Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya</i>	

PENERAPAN BIMBINGAN KELOMPOK MODEL PERMAINAN BELAJAR BERSIKAP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Triandriyani dan Hermien Laksmiwati

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Surabaya

e-mail: hermien_laksmiwati@yahoo.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan penerapan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di sekolah. Penelitian ini menggunakan rancangan pre-eksperimen berupa “*pre-test*” dan “*post-test one group design*”. Subjek dalam penelitian ini adalah 8 siswa kelas VII SMPN 1 Diwek, Jombang dengan skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah rendah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik dengan *Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon* yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah antara sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan hasil *Uji Wilcoxon* diketahui bahwa $T_{hitung} = 0$, dengan $N=8$ dan taraf signifikan 0,05 maka $T_{tabel} = 4$. Berarti T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($0 < 4$), sehingga hipotesis penelitian diterima dan dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap merupakan pendekatan yang efektif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di sekolah.

Kata kunci: Bimbingan kelompok, kemampuan penyesuaian diri di sekolah.

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa individu mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan baik dengan lingkungan barunya sehingga tidak akan mengalami hambatan dalam pergaulan. Penyesuaian diri akan menumbuhkan rasa optimis dan positif yang dapat mendorong anak berbuat lebih banyak dan teliti sehingga kemungkinan berhasil akan diperolehnya. Sebaliknya, individu yang kurang bisa menyesuaikan diri berpeluang untuk mengalami kegagalan dalam proses pendidikan dan pembelajarannya. Individu yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan mengalami perasaan tertekan karena merasa dikucilkan dari pergaulan. Hal ini sesuai dengan pandangan Panut Panuju (2005: 37) yang menyatakan bahwa individu yang tidak dapat menyesuaikan diri akan memiliki kekurangan-kekurangan sehingga akan merasa terasing dan terisolir dari lingkungan masyarakat di mana dia hidup.

Permasalahan penyesuaian diri di

sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru, teman, maupun mata pelajaran yang baru. Perpindahan dari lingkungan yang lama ke lingkungan masyarakat yang baru seringkali menyebabkan remaja mengalami kesulitan dalam membentuk persahabatan dan hubungan sosial yang baru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah dengan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya (Sunarto, 1999: 238-239).

Salah satu layanan yang dapat diterapkan dalam membantu pemecahan permasalahan penyesuaian siswa adalah layanan bimbingan kelompok. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan lingkungan, penyesuaian diri serta pengembangan diri (Juntika, 2006: 23). Bimbingan kelompok merupakan suatu pemberian bantuan (bimbingan) yang diberikan kepada

peserta didik melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan dan pemecahan masalah siswa yang menjadi peserta layanan.

Teknik yang dapat diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok adalah teknik umum dan permainan kelompok (Tohirin 2007: 173). Permainan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok baik sebagai pelengkap teknik-teknik yang lain maupun sebagai suatu teknik tersendiri yang merupakan wahana pemuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu.

Menurut Prasetyo (2007: 68), melalui kegiatan kelompok bermain akan diperoleh berbagai pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antar manusia dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Senada dengan pendapat Prasetyo di atas, Mulyono (2002: 4) menyatakan bahwa melalui permainan akan tercipta suatu suasana yang menyenangkan. Melakukan beberapa latihan permainan dalam suasana yang rileks akan membuat peserta mendapat pengalaman tersendiri. Dalam permainan tersebut peserta didik dapat melampiaskan dorongan-dorongan emosinya sehingga tercipta perasaan lega dan puas. Suasana menyenangkan dan santai yang tercipta selama permainan berlangsung akan menimbulkan suatu pengalaman tersendiri bagi peserta didik yang kemudian akan direnungkan untuk menyadari perasaan dan reaksi-reaksi mereka. Dinamika kelompok yang tercipta juga akan mendorong peserta didik untuk mampu melakukan interaksi sosial sehingga peserta didik akan mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul satu pertanyaan besar, yaitu apakah bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap dapat meningkat-kan

kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah.

Bimbingan Kelompok Model Permainan Belajar Bersikap

Menurut Juntika (2006: 23), bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Senada dengan Juntika, Tohirin (2007: 170) menyatakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan permasalahan individu yang menjadi peserta layanan.

Adapun keunggulan bimbingan kelompok menurut Prayitno dalam Nursalim (2002: 53) meliputi beberapa aspek, yaitu (a) menyangkut aspek ekonomis/efisiensi, yaitu dengan adanya kelompok akan semakin banyak orang yang dibantu sehingga relatif membutuhkan waktu yang lebih cepat; (b) dengan adanya interaksi yang intensif dan dinamis diharapkan tujuan bimbingan dapat tercapai secara lebih mantap; (c) dinamika yang terjadi dalam kelompok mencerminkan suasana kehidupan nyata yang dapat dijumpai di masyarakat.

Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi siswa. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa (Tohirin, 2007: 172).

Menurut Jumhur dan Surya (dalam Nursalim, 2002: 57), teknik-teknik yang ada dalam bimbingan meliputi home room, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, remedial teaching, psikodrama, sosiodrama, bermain, dan kerja kelompok. Permainan juga dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. Permainan kelompok yang efektif dan dapat dijadikan sebagai teknik dalam layanan bimbingan kelompok harus memenuhi ciri-ciri sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana santai dan tidak melelahkan, meningkatkan keakraban, dan diikuti oleh semua anggota kelompok.

Penerapan model permainan ini telah berkembang lebih dulu di Eropa dan Amerika. Salah satu tokoh yang mengembangkan model permainan ini adalah Klaus Vopel yang telah mengumpulkan, mengembangkan, dan menerapkan banyak sekali permainan interaksi di Jerman (Siregar, 1993: xxiii). Mulyono (2002:4) menyatakan bahwa melalui permainan akan diciptakan suatu suasana yang menyenangkan. Melakukan beberapa latihan permainan dalam suasana yang rileks bisa memberikan suatu pengalaman bagi peserta. Melalui pengalaman yang diperoleh, peserta didik diajak untuk menghayati pengalaman tersebut kemudian merenungkannya sehingga mereka bisa menyadari perasaan dan reaksi-reaksi fisik mereka. Selanjutnya mereka diajak untuk mengungkapkan hal-hal yang dialami waktu latihan atau permainan berlangsung. Pengalaman yang diperoleh kemudian diolah secara kelompok bersama pembimbing dengan cara mendiskusikannya dan menarik kesimpulan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap adalah suatu kegiatan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu atau murid

untuk membantu menyelesaikan masalah. Masalah pendidikan atau pengajaran, pekerjaan, situasi sosial, dan sebagainya dapat diatasi dengan permainan belajar bersikap yang berguna untuk merangsang dan membina pengalaman-pengalaman pribadi atau kelompok.

Menurut Siregar (1993: 6), prosedur pelaksanaan permainan secara umum melalui beberapa tahap, yaitu tahap permulaan, tahap bermain, dan tahap evaluasi. Pada tahap permulaan, fasilitator mengusulkan suatu permainan/latihan dan menjelaskan cara bermain serta peraturan permainan. Ia harus memastikan bahwa setiap peserta sudah mengerti permainan yang akan dijalani.

Pada tahap selanjutnya, tahap bermain, fasilitator tidak ikut berperan. Hasil dari permainan/latihan yang sedang dijalankan merupakan tanggung jawab kelompok dan masing-masing anggota kelompok. Mereka-lah yang menentukan proses bermain sedangkan fasilitator hanya mengamati proses bermain supaya dapat dibahas bersama kelompok setelah permainan berakhir.

Tahap terakhir dan yang sangat penting adalah tahap evaluasi. Tahap ini tidak boleh dilewatkan begitu saja karena setelah permainan selesai dan dievaluasi, arti dan makna dari permainan/latihan yang baru dilakukan akan jelas bagi peserta. Pada tahap ini fasilitator mendorong para peserta untuk memikirkan pengalaman-pengalaman mereka yang baru dan memberanikan mereka untuk mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, fasilitator dapat menyimpulkan dan menunjukkan hasil ataupun dasar yang penting dari latihan yang telah dilakukan.

Penyesuaian Diri di Sekolah

Menurut Sunarto (1999: 222), penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sedangkan menurut Sofyan Willis (2005: 55), penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup

dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya sehingga ia merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha atau kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya sehingga ia memperoleh keharmonisan dan kepuasan terhadap diri dan lingkungannya.

Lingkungan sekolah adalah sebuah lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Selain mengembangkan fungsi pengajaran, sekolah juga mengembangkan pendidikan (transformasi norma). Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakekatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai tempat rujukan dan perlindungan jika anak didik mengalami masalah.

Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar manusia yang mempunyai arti bagi manusia itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka lingkungan sekolah merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak (siswa) yang dapat mempengaruhi perkembangan anak (siswa) baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Nana Sudjana (1987: 18) menyatakan bahwa lingkungan nonfisik sekolah adalah hubungan siswa dengan teman sebaya, hubungan siswa dengan guru, dan hubungan siswa dengan personil sekolah lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri di sekolah adalah kemampuan anak (siswa) untuk mempertahankan diri dalam berhubungan dan bergaul secara wajar dengan teman sebaya, guru, dan personil sekolah lainnya, sehingga dapat bertindak sesuai tuntutan lingkungan sekolah dan memperoleh kepuasan dalam hubungan tersebut.

Ciri-ciri penyesuaian diri yang baik menurut Kartini Kartono (1989: 261) adalah dapat mengendalikan pikiran, angan-angan, keinginan, dorongan emosi, dan tingkah lakunya. Dapat menghayati kelemahannya sehingga ia dapat mengadakan perbaikan diri,

juga dapat memanfaatkan kelebihanannya. Mempunyai konsep yang sehat tentang dirinya, yaitu mengakui dan menerima kelebihan serta kelemahannya secara rasional. Mengikuti perkembangan diri dengan berpedoman pada perbaikan, kejujuran, kebijaksanaan, rendah hati dan lain-lain. Mampu mengatasi perubahan sosial dan perubahan diri yang fleksibel. Dapat menghadapi setiap frustrasi dan konflik batin dengan mekanisme yang sehat sehingga tercapai keuntungan dan kematangan diri.

Sedangkan menurut S. T. Vebriato (1990: 169), kriteria penyesuaian diri adalah kepuasan psikis, efisiensi kerja, gejala-gejala fisik, dan penerimaan sosial. Kepuasan psikis dapat terjadi setelah adanya keberhasilan penyesuaian diri. Sedangkan efisiensi kerja adalah keberhasilan menyesuaikan diri yang akhirnya dapat menampakkan kerja atau kegiatan yang efisien. Sementara gejala-gejala fisik adalah tampaknya gejala-gejala seperti pusing, sakit perut, gangguan pencernaan, dan lain-lain akibat dari penyesuaian diri yang gagal. Adapun penerimaan sosial adalah timbulnya reaksi persetujuan dari masyarakat sebagai hasil dari penyesuaian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka ciri-ciri penyesuaian diri yang baik adalah ketika seseorang dapat mengendalikan pikiran, angan-angan, keinginan, dorongan emosi, dan tingkah lakunya. Mengakui, menerima, dan memperbaiki kelemahannya secara rasional. Mampu mengatasi perubahan diri dan sosial secara fleksibel. Dapat mencapai kepuasan psikis. Dapat menampakkan efisiensi kerja. Dapat menumbuhkan penerimaan sosial serta tidak menampakkan gejala-gejala fisik yang tidak sehat akibat dari pergaulan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian *pre-eksperimental design* dengan model *pre-test* dan *post-test*

one group design. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Diwek, Jombang yang memiliki tingkat penyesuaian diri rendah di sekolah. Siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 8 orang ($N=8$) yang mendapat perlakuan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket kemampuan penyesuaian diri di sekolah. Kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan 8 teknik permainan belajar bersikap. Masing-masing teknik diterapkan dalam satu kali pertemuan.

Adapun prosedur dari eksperimen yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemberian *pre-test* (O1) untuk mengukur tingkat kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah.
2. Pelaksanaan perlakuan (*treatment*) bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap kepada subyek penelitian.
3. Pemberian *post test* (O2) untuk mengukur tingkat kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah setelah perlakuan.
4. Membandingkan O1 dan O2 untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah antara sebelum dan sesudah diberi penerapan bimbingan kelompok model belajar bersikap.

Angket yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan penyesuaian diri di sekolah adalah angket yang disusun oleh penulis sendiri, dimana jenis angket adalah tertutup jika dilihat dari cara menjawabnya, langsung jika dilihat dari cara menjawabnya dan *check list* bila dilihat dari bentuknya. Kisi-kisi angket kemampuan penyesuaian diri di sekolah, adapun indikatornya adalah dapat mengendalikan pikiran, angan-angan, keinginan, dorongan emosional, tingkah laku, mengetahui, menerima, dan memperbaiki kelemahan secara rasional, mampu mengatasi perubahan diri dan sosial secara fleksibel, dapat

mencapai kepuasan psikis, dapat mencapai efisiensi kerja, menunjukkan penerimaan sosial dalam bergaul, dan tidak menampakkan gejala fisik yang tidak sehat. Skor jawaban angket kemampuan penyesuaian diri di sekolah dinilai dengan skor berikut yang mereka dimiliki.

	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak
Favorable	4	3	2	1
Unfavorable	1	2	3	4

Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditasan atau keaslian suatu instrument (Arikunto, 2006:168). Untuk mengetahui validitas instrument dalam penelitian ini yaitu angket kemampuan penyesuaian diri di sekolah adalah cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total, yaitu nilai yang diperoleh pada semua item dari masing-masing indikator.

Dari hasil perhitungan validitas di atas maka dapat diketahui bahwa untuk item no.1 $t_{hitung} = 0,651$ yang kemudian dikonsultasikan dengan t_{table} dengan subyek $N = 34$ taraf signifikan 5% batas penolakan sebesar 0,339. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($0,651 > 0,339$), maka data angket penerapan bimbingan kelompok model permainan belajar.

Reliabilitas

Reliabilitas angket pada penelitian ini menggunakan teknik belah dua *Spearman Brown*. Hasil analisis menunjukkan bahwa angket penyesuaian diri memiliki indeks sebesar 0,962 atau dengan kata lain sangat reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan statistik pada instrument pengumpulan data yang dilakukan sebelum perlakuan, diketahui terdapat 8 orang siswa SMPN 1 Diwek Jombang yang teridentifikasi memiliki kemampuan penyesuaian diri di sekolah rendah yaitu : FZ memiliki skor 131 dengan kategori rendah, MA memiliki skor 121 dengan kategori rendah, ESN memiliki skor 128 dengan kategori rendah, ZR memiliki skor 122 dengan kategori rendah, ACA memiliki skor 117 dengan kategori rendah, EA memiliki skor 130 dengan kategori rendah, EE memiliki skor 128 dengan kategori rendah, dan SDC memiliki skor 123 dengan kategori rendah.

Penentuan skor tinggi diperoleh dari perhitungan mean standart deviasi (SD), yang kemudian diperoleh skor kategori rendah yaitu nilai rendah kurang dari 135 dan kategori sedang yaitu nilai antara 136 sampai 153 serta kategori tinggi dengan nilai 154 keatas. Siswa dengan skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah kategori rendah kemudian diberi bantuan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di sekolah tersebut dengan menggunakan bimbingan kelompok model permainan belajar sikap. Hasil yang diperoleh setelah melakukan perlakuan bimbingan kelompok model permainan belajar diketahui dari dari instrument pengumpul data yang diberikan kepada subjek penelitian.

Setelah data terkumpul sesuai dengan metode yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan dengan cermat dan teliti sebab kekeliruan dalam pengumpulan data akan

mengakibatkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui benar atau tidaknya hipotesis yang digunakan, maka digunakan statistik non-parametrik dengan uji jenjang Wilcoxon untuk mengolah data yang terkumpul.

Setelah diberikan perlakuan, kedelapan subjek tersebut diberikan *post test* yang bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya perlakuan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap yang diberikan. Dari hasil *pre test* dan *post-test*, diketahui bahwa masing-masing subjek mengalami peningkatan skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah yang cukup beragam. Berikut dapat dilihat dari table Analisis *pre-test* dan *post-test* dengan uji Wilcoxon.

Tabel 1. Hasil analisis *pre-test* dan *post-test* kemampuan penyesuaian diri di sekolah (Uji Wilcoxon)

No.	Nama Responden	Pre-test	Post-test	Beda	Peringkat	Tanda Peringkat	
		Xi	Yi	(Yi-Xi)	(Yi-Xi)	(+)	(-)
1	FZ	131	161	+30	7	7	
2	MA	121	148	+27	4	4	
3	ESN	128	144	+16	2	2	
4	ZR	122	150	+28	5	5	
5	ACA	117	146	+29	6	6	
6	EA	130	163	+33	8	8	
7	EE	128	143	+15	1	1	
8	SDC	123	147	+24	3	3	
Jumlah						36	0

Hasil dari analisis di atas menunjukkan adanya suatu perbedaan skor sebelum dan sesudah perlakuan. Hal ini berarti bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap memiliki pengaruh positif terhadap siswa yang sebelumnya kurang mampu menyesuaikan diri di sekolah. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon's Signed Rank Test*) terdapat perbedaan skor kemampuan penyesuaian diri di sekolah yang

cukup signifikan. Berdasarkan tabel nilai kritis T untuk Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dengan taraf signifikan 5 % dan $N=8$ diperoleh $T_{tabel}=4$ sehingga T_{hitung} lebih kecil T_{tabel} ($0 < 4$) berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap mampu meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. Dengan demikian hipotesis peneliti yang berbunyi “Terdapat perbedaan yang signifikan dalam skor penyesuaian diri sebelum dan sesudah penerapan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Diwek, Jombang” dapat diterima.

Artinya, bahwa dengan penerapan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap peserta kelompok diajak melakukan latihan atau permainan belajar bersikap yang bertujuan untuk mendorong peserta agar mampu belajar dari pengalaman yang telah diperolehnya dalam kegiatan kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Prasetyo (2007: 68) yang mengungkapkan bahwa melalui kegiatan bermain individu akan memperoleh berbagai pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antarmanusia dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik.

Aktifitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan lingkungan, penyesuaian diri serta pengembangan diri (Juntika, 2006 : 23). Dengan permainan peserta didik dapat melampiaskan dorongan-dorongan emosinya sehingga tercipta perasaan lega dan puas. suasana menyenangkan dan santai yang tercipta selama permainan berlangsung akan menimbulkan suatu pengalaman tersendiri bagi peserta didik yang kemudian akan direnungkan untuk menyadari perasaan dan reaksi mereka. Dinamika kelompok yang terbentuk selama permainan berlangsung akan mendorong peserta layanan untuk mampu melakukan interaksi social sehingga peserta didik akan mampu menyesuaikan diri.

Dalam pelaksanaan sebanyak 8 kali pertemuan, peneliti tidak lepas dari berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dirasakan adalah terbatasnya ruangan yang tersedia dikarenakan ruangan konseling sedang direnovasi. Disamping itu, peserta kelompok dapat bermain secara sportif karena menginginkan kelompoknya menjadi pemenang. Untuk mengatasi hambatan tersebut, peneliti memanfaatkan ruang perpustakaan untuk pelaksanaan permainan. Selain itu, pemberian rasional permainan harus dilakukan dengan jelas agar peserta memahami aturan-aturan permainan serta tujuan yang ingin dicapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor penyesuaian diri di sekolah sebelum dan sesudah penerapan bimbingan kelompok model permainan belajar bersikap pada siswa kelas VII SMP Negeri yang menjadi subjek penelitian ini. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, bagi konselor sekolah diharapkan mampu memperkaya model-model permainan yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan siswa di sekolah; Kedua, kepada peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian dalam bentuk bimbingan kelompok disarankan untuk menerapkan model lain sehingga bisa menambah kekayaan teknik bimbingan kelompok dalam menangani permasalahan peserta didik khususnya permasalahan penyesuaian diri di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hurlock, B. Elizabeth. 1993. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1989. *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Martini. 2005. *Prosedur dan Prinsip-prinsip Statistika*. Surabaya: UNESA University Press.
- Mulyono, Tri dan Setya Haji Winarna. 2002. *Bermain Belajar Bersikap*. Surabaya: Plan Indonesia.
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2006. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nursalim, Mochamad dan Suradi. 2002. *Layanan Bimbingan dan Konseling*. Surabaya: UNESA University Press.
- Panuju, Panut dan Ida Umami. 2005. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2007. *Membedah Psikologi Bermain Anak*. Yogyakarta: Think.
- Rumini, Sri dan Sundari Siti. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. 1987. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunarto dan Hartono Agung. 1999. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vebriarto, S. T. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Willis, Sofyan. 1994. *Problem Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa.
- _____. 2005. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

BENTUK, PENYEBAB, DAN DAMPAK DARI TINDAK KEKERASAN GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR DARI PERSPEKTIF SISWA DI SMPN KOTA SURABAYA: SEBUAH SURVEY

Tamsil Muis, Muhammad Syafiq, dan Siti Ina Savira

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Surabaya

e-mail: inasavira@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi kuantitatif dari bentuk, penyebab, dan dampak dari tindak kekerasan guru terhadap siswanya dalam interaksi belajar mengajar berdasarkan perspektif siswa. Studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Pengawas Sekolah Kota Surabaya, untuk mendapat rekomendasi mengenai lokasi penelitian yang dianggap sesuai. Lima Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Surabaya dipilih berdasarkan rekomendasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar angket terhadap 210 subyek yang menjadi sampel penelitian dari 5 lokasi penelitian. Angket tersebut terdiri dari 36 item pertanyaan dan pernyataan tertutup yang dikembangkan oleh tim peneliti mengenai bentuk, penyebab, dan dampak dari tindak kekerasan yang pernah menimpa siswa. Hasil survey menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang muncul adalah kekerasan verbal sebesar 32,6%; psikologis sebesar 46,1%; dan fisik sebesar 12,4%. Penyebab dari tindak kekerasan tersebut antara lain dipicu kesalahan siswa (29,2%), temperamen guru (2,2%), serta alasan yang tidak diketahui siswa (11,8%), dan lain-lain yang sebagian besar juga merujuk pada perilaku siswa (35,4%). Dampak dari tindakan tersebut antara lain perasaan minder (2,8%), marah (48,9%), sedih (5,1%), ingin balas dendam (0,6%), dan sakit hati (38,2%). Selain itu, diketahui bahwa 24,7% siswa yang melaporkan pernah mengalami tindak kekerasan dalam berbagai bentuk adalah laki-laki, sementara siswa perempuan sebesar 64,9%.

Kata kunci: Kekerasan dalam interaksi belajar mengajar.

Pendidikan anak seringkali tidak lepas dari tindak kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan pada anak dapat bermacam-macam, mulai verbal hingga fisik. Di Indonesia angka kekerasan terhadap anak secara umum semakin meningkat. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Jawa Tengah melaporkan sepanjang Januari–Nopember 2003 terdapat 285 kasus kekerasan dan eksploitasi atas anak, seorang diantaranya meninggal. Di Sulawesi Selatan pada periode yang sama tercatat 187 kasus kekerasan terhadap anak, 37 % diantaranya berupa kekerasan seksual dan 19 % kekerasan fisik (Kompas, 27 Juli 2005).

Fenomena tersebut semakin memprihatinkan, sebab tindak kekerasan juga terjadi di sekolah, yang merupakan lembaga pendidikan dimana orangtua mempercayakan anak-anak mereka untuk mendapat

pendidikan. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kerap dianggap sebagai bagian dari pendidikan ataupun pembentukan perilaku. Hasil penelitian Unicef di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sebagian besar, hampir 80%, dilakukan oleh guru (Jawa Pos, 20 Nopember 2007). Data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari laporan masyarakat dan pemberitaan media massa juga menunjukkan peningkatan tindakan kekerasan guru terhadap siswa secara signifikan, yakni 39% dari 95 kasus kekerasan yang terjadi selama Januari hingga April 2008 (Kompas, 5 Juni 2008). Prosentase ini meningkat jika dibandingkan dengan data KPAI tentang kekerasan guru pada siswa pada tahun 2007 yang mencapai 11,3%. KPAI juga

mencatat bahwa selama dua tahun terakhir, yakni tahun 2007 dan 2008, korban terbanyak selalu berasal dari siswa SD dan SMP.

Hasil dengan kecenderungan serupa dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Sejiwa tentang kekerasan di tiga kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, yang mencatat terjadinya tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan 66,1 di tingkat sekolah lanjutan pertama (SMP) (Media Indonesia, 1 Juni 2008).

Kasus kekerasan di sekolah juga telah banyak diliput media massa. Seorang guru olahraga SMP di Surabaya menghukum seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan berlari beberapa kali putaran. Namun karena fisiknya lemah, sang siswa akhirnya meninggal dunia (Jawa Pos, 17 Oktober 1997). Di Riau, seorang guru SD menghukum muridnya dengan berlari keliling lapangan dalam kondisi telanjang bulat (Jawa Pos, 25 April 2002). Media Indonesia (28 Nopember 2006), memberitakan bahwa di Sulawesi Selatan ada seorang siswa SMA meninggal akibat lemparan batu yang mengenai kepalanya oleh seorang guru olahraga. Tiga orang siswa SMKN 1 Gempol Pasuruan melaporkan wakil kepala sekolah mereka ke polisi dengan tuduhan melakukan penganiayaan (Seputar Indonesia, 8 Agustus 2008).

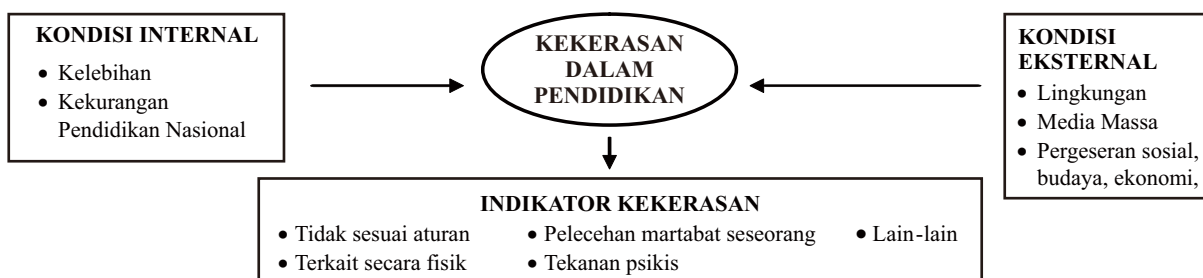
Beberapa asumsi bisa diajukan untuk menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. **Pertama**, kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat

adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan bisa terjadi bila antara pelaku dan korban terjadi aksi saling balas-dendam. Tawuran antar-pelajar atau antar-mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum, yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. **Ketiga**, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa. Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kecenderungan media massa dalam memberitakan aksi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemirsanya. **Keempat**, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas. **Kelima**, kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Faktor pertama dan kedua mungkin manifestasi dari kondisi internal pendidikan, sedangkan faktor ketiga sampai kelima merupakan kondisi eksternal pendidikan. Hubungan kedua kondisi kekerasan beserta indikatornya, dapat diilustrasikan pada Skema 1.

Skema 1: Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Pendidikan



Covey (1998) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat dua pemicu kemunculan kekerasan dalam interaksi belajar mengajar terhadap siswa. *Pertama*, pemicu dari dalam yang berupa prakarsa guru. Tindakan yang dipicu oleh prakarsa guru biasanya sebelum muncul telah direncanakan terlebih dahulu. *Kedua*, pemicu dari luar yang berupa perilaku siswa. Tindakan yang muncul karena dipicu oleh perilaku siswa, biasanya bersifat kreatif sehingga belum direncanakan karena kemunculan serta sifat perilaku siswa sangat kontekstual.

Adapun kekerasan atau agresi, umumnya didefinisikan dengan menekankan pada bentuk dan tujuan dari perilaku tersebut. Berkowitz (1995:4) mendefinisikan agresi sebagai bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Selain itu Steinmetz (dalam Kashani dkk., 1991:218) juga menyatakan bahwa agresi adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui konflik. Tingkah laku agresi ini pada dasarnya merupakan tingkah laku yang bertujuan untuk melukai, menyakiti atau merugikan orang lain (Baron & Graziano, 1991:312). Baron (1996:347) menambahkan bahwa agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.

Ada tiga perspektif teoritis berbeda tentang penyebab kekerasan manusia, yaitu bersifat instingtif, semata-mata hasil belajar, dan respons *innate* yang didorong oleh frustrasi (Gilligan, 1996). Teori insting tentang kekerasan, diantaranya ditulis Freud (1953) tentang dorongan bagi tindakan destruktif terhadap insting yang mati dan tulisan Lorenz (1971) tentang agresi sebagai insting yang meningkatkan ketahanan hidup, mengasumsikan bahwa manusia memiliki sumber dorongan agresif yang sifatnya otonomi dari dalam dirinya, suatu dorongan untuk melakukan kekerasan yang dalam kata-

kata Lorenz menunjukkan *ledakan tak tertahankan yang muncul teratur secara ritmis*" (Lorenz, 1971).

Selain disebabkan dorongan insting dari dalam diri sendiri, perilaku kekerasan atau agresi juga dapat disebabkan oleh faktor belajar sosial. Teori Belajar Sosial (Social Learning) yang dimotori oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan memelihara respon-respon agresif pada diri seseorang. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Anak-anak yang melihat model orang dewasa agresif secara konsisten akan lebih agresif bila dibandingkan dengan anak-anak yang melihat model orang dewasa non agresif.

Asumsi psikologis ketiga adalah bahwa kebanyakan kekerasan terjadi sebagai respons terhadap frustrasi. Frustrasi merupakan gangguan dengan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Salah satu teori frustrasi-agresi yang paling berpengaruh dikemukakan Dollard dan koleganya di Yale pada 1939 (Dollard & Miller, 1950). Dalil dasar dari teori ini adalah bahwa terjadinya perilaku kekerasan selalu mensyaratkan keberadaan frustrasi, dan sebaliknya keberadaan frustrasi selalu menimbulkan beberapa bentuk kekerasan.

Bagian kedua dari dalil tersebut tidak bermaksud menunjukkan bahwa kekerasan merupakan satu-satunya respon terhadap frustrasi, melainkan bahwa frustrasi menghasilkan dorongan terhadap berbagai respons, salah satunya kekerasan. Bila respons non kekerasan tidak dapat menghilangkan frustrasi, maka semakin besar probabilitas bagi dorongan kekerasan akhirnya menjadi dominan sehingga terjadi beberapa respons kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, dampak, dan penyebab tindak

kekerasan guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dari perspektif siswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai perspektif siswa terhadap fenomena kekerasan dalam pendidikan, terutama dengan guru sebagai pelaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey merupakan salah satu bentuk penelitian kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapat, keyakinan, atau karakteristik suatu populasi (Creswell, 1994). Metode ini terutama unggul dalam hal efisiensi dalam mengumpulkan data dalam jumlah banyak.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dari 5 SMP Negeri Surabaya dengan jumlah sampel 210 orang. Alat pengumpul data yang digunakan adalah angket yang terdiri dari 36 item berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai bentuk, dampak, dan penyebab tindak kekerasan yang dilakukan guru dalam interaksi belajar mengajar dari perspektif siswa. Data angket tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi tindak kekerasan yang dilaporkan siswa. Angket tersebut dikembangkan sendiri oleh tim peneliti. Validitas isi dari angket diperoleh melalui penilaian panelis terhadap kesesuaian isi angket dengan teori yang digunakan. Angket juga diujicobakan pada 5 orang siswa

SMP dari sekolah yang berbeda, untuk melihat apakah item-item dalam angket dapat dipahami sesuai tujuan peneliti. Hasil revisi diperhatikan untuk menjadi masukan dalam memperbaiki item angket.

Data dianalisis menggunakan bantuan software SPSS versi 16 untuk mendapatkan data deskriptif mengenai frekuensi, bentuk, dampak, dan penyebab dari tindak kekerasan guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

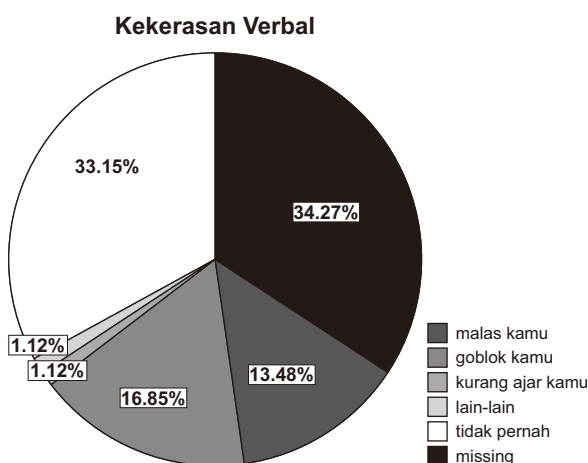
Berdasarkan angket yang disebar kepada 210 subyek, response rate atau respon terhadap angket adalah sebesar 85%. Dengan demikian, terdapat sekitar 32 angket yang tidak dapat digunakan datanya, antara lain disebabkan angket tidak dikembalikan atau tidak diisi. Hasil dari angket akan disampaikan dalam bentuk tabel dan pie chart, yaitu mencakup bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, penyebab, dan dampak dari tindak kekerasan guru terhadap murid, serta ringkasan yang menggambarkan secara umum frekuensi terjadinya kekerasan dari subyek penelitian, dan secara lebih spesifik, paparan data mengenai perbedaan frekuensi antara siswa laki-laki dan perempuan yang melaporkan tindak kekerasan guru yang pernah mereka alami. Berikut adalah ringkasan dari bentuk kekerasan verbal yang dialami siswa.

Tabel 1. Ringkasan respon siswa terhadap bentuk kekerasan verbal yang pernah dialami bentuk kekerasan verbal

Bentuk Kekerasan Verbal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	malas kamu	24	13.5	20.5	20.5
	goblok kamu	30	16.9	25.6	46.2
	kurang ajar kamu	2	1.1	1.7	47.9
	lain-lain	2	1.1	1.7	49.6
	tidak pernah	59	33.1	50.4	100.0
	Total	117	65.7	100.0	
Missing	System	61	34.3		
Total		178	100.0		

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dialami subyek antara lain dimarahi dengan kata-kata 'malas kamu' sebesar 13,5%; 'goblok kamu' sebesar 16,9%; 'kurang ajar kamu' sebesar 1%; lalu lain-lain sebesar 1%. Bentuk kekerasan verbal lain-lain antara lain dipanggil dengan nama orangtua dan memanggil dengan nama lain yang tidak sesuai dengan nama aslinya. Sebesar 33% mengatakan tidak pernah mengalami bentuk kekerasan ini. Selanjutnya, sekitar 34% subyek tidak memberi respon pada item ini.

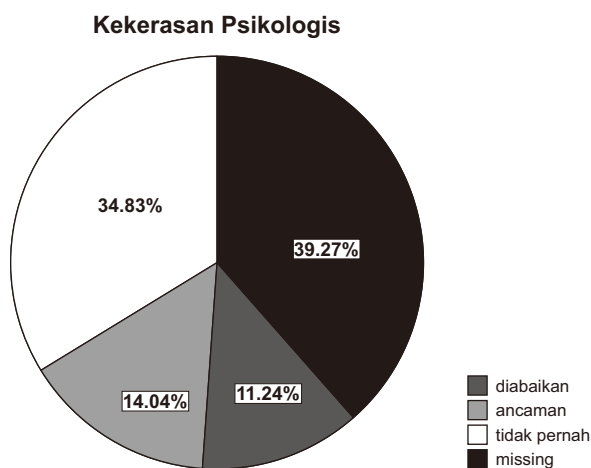
Gambar 1. Ringkasan respon siswa terhadap kekerasan verbal yang dialami



Selanjutnya adalah bentuk kekerasan psikologis, termasuk di dalamnya adalah pengabaian dan ancaman.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sekitar 11% siswa pernah mengalami kekerasan psikologis berupa pengabaian atau tidak diperdulikan; sekitar 14% siswa melaporkan pernah diancam, sementara hampir 35% mengatakan tidak pernah mengalami bentuk kekerasan ini. Sementara itu, sebesar 40% subyek tidak memberi respon pada item ini. Ringkasan data di atas diilustrasikan dalam bentuk chart pada Gambar 2

Gambar 2. Ringkasan respon siswa terhadap kekerasan psikologis yang dialami



Bentuk kekerasan yang ketiga adalah kekerasan fisik. Berikut adalah ringkasan hasil respon siswa terhadap kekerasan fisik yang dialami (pada halaman selanjutnya).

Tabel 2. Ringkasan respon siswa terhadap kekerasan psikologis yang pernah dialami

Kekerasan Psikologis					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	diabaikan	20	11.2	18.7	18.7
	ancaman	25	14.0	23.4	42.1
	tidak pernah	62	34.8	57.9	100.0
	Total	107	60.1	100.0	
Missing	System	71	39.9		
Total		178	100.0		

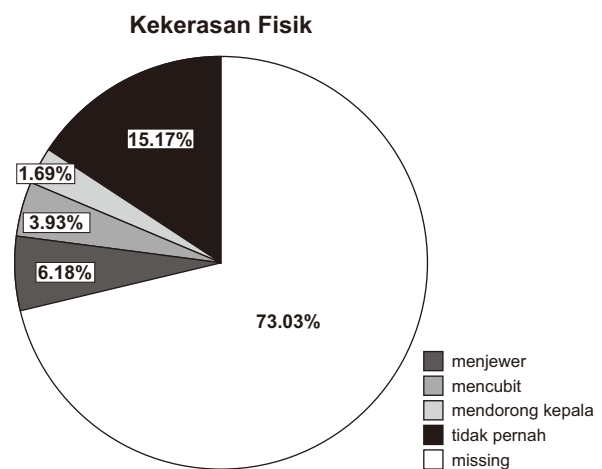
Tabel 3. Ringkasan respon siswa terhadap kekerasan fisik yang pernah dialami

		Bentuk Kekerasan Fisik			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menjewe	11	6.2	22.9	22.9
	mencubit	7	3.9	14.6	37.5
	mendorong kepala	3	1.7	6.2	43.8
	tidak pernah	27	15.2	56.2	100.0
	Total	48	27.0	100.0	
Missing	System	130	73.0		
Total		178	100.0		

Tabel di atas menunjukkan sebesar 6,2% siswa menyatakan pernah dijewe, sementara hampir 4% menyatakan pernah dicubit, sisanya, sebesar hampir 2% menjawab pernah didorong kepalanya. Sebesar 15% siswa menjawab tidak pernah mengalami kekerasan fisik, dan 73% subyek tidak merespon item ini. Ringkasan data di atas diilustrasikan dalam bentuk *chart* pada Gambar 3.

Selanjutnya, laporan mengenai jumlah kejadian yang muncul di 5 SMPN Surabaya yang menjadi sampel penelitian ini disampaikan dalam ringkasan tabel 4 berikut ini.

Gambar 3. Ringkasan respon siswa terhadap bentuk kekerasan fisik yang dialami



Tabel 4. Ringkasan jumlah kejadian yang dilaporkan siswa terkait tindak kekerasan yang pernah dialami

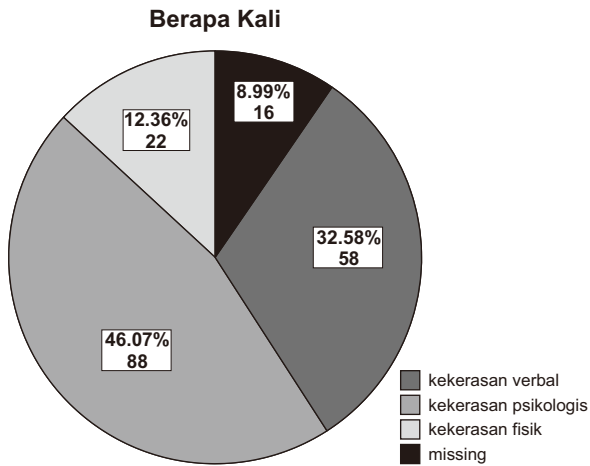
		Berapa Kali			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kekerasan verbal	58	32.6	35.8	35.8
	kekerasan psikologis	82	46.1	50.6	86.4
	kekerasan fisik	22	12.4	13.6	100.0
	Total	162	91.0	100.0	
Missing	System	16	9.0		
Total		178	100.0		

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan guru kepada murid dalam interaksi belajar-mengajar berupa kekerasan verbal muncul sebesar 32,6% atau sekitar 58 kejadian,

sementara 46% atau sekitar 82 kejadian merupakan bentuk kekerasan psikologis, dan 12% atau sekitar 22 kejadian merupakan kekerasan fisik. Dengan demikian, dari 5 SMPN di Surabaya yang menjadi sampel

penelitian, kejadian tindak kekerasan guru terhadap murid muncul dalam berbagai bentuk muncul hingga 91% atau 162 kejadian.

Gambar 4. Ringkasan jumlah kejadian yang dilaporkan siswa terkait tindak kekerasan yang pernah dialami

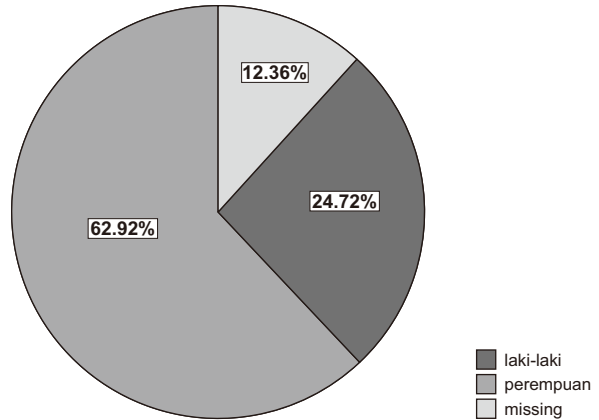


Secara umum, gambaran frekuensi siswa laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami tindak kekerasan digambarkan dalam tabel 5.

Berdasarkan data tabel 5 di bawah, diketahui bahwa siswa laki-laki yang melaporkan pernah mengalami tindak kekerasan guru terhadap siswa dalam berbagai bentuk adalah sebesar 24,7%, sementara perempuan lebih banyak, yaitu mencapai hampir 63%. Lebih jelasnya, data tersebut ditampilkan dalam bentuk *chart* seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Ringkasan frekuensi siswa laki-laki dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan

Frekuensi berdasar Jenis Kelamin



Selanjutnya, data angket juga mengungkap alasan atau penyebab munculnya tindak kekerasan guru terhadap siswa menurut siswa itu sendiri. Tabel 6 menampilkan ringkasan data respon siswa.

Berdasarkan tabel 6 (halaman berikut) 11,8% siswa menyatakan tidak mengetahui alasan dilakukannya tindak kekerasan tersebut, sementara sebesar 29% siswa mengakui bahwa sebab munculnya tindakan tersebut karena dipicu perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, temperamen atau watak guru disebutkan oleh 2% siswa sebagai penyebab tindak kekerasan. Selain itu, 35% jawaban siswa beragam, antara lain karena siswa ramai di kelas, malas, dan tidak memperhatikan. Gambar 6 berikut menampilkan ringkasan data respon siswa dalam bentuk *chart*.

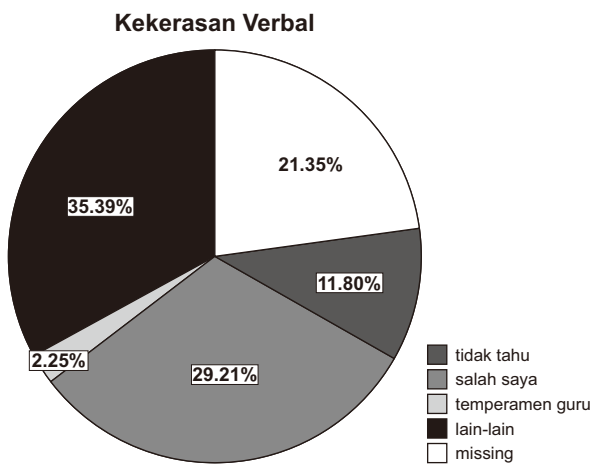
Tabel 5. Ringkasan frekuensi siswa laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami tindak kekerasan

Frekuensi berdasar Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	44	24.7	28.2	28.2
	perempuan	112	62.9	71.8	100.0
	Total	156	87.6	100.0	
Missing	System	22	12.4		
Total		178	100.0		

Tabel 6. Ringkasan respon siswa mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan

		Penyebab alasan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak tahu	21	11.8	15.0	15.0
	salah saya	52	29.2	37.1	52.1
	temperamen guru	4	2.2	2.9	55.0
	lain lain	63	35.4	45.0	100.0
	Total	140	78.7	100.0	
Missing	System	38	21.3		
Total		178	100.0		

Gambar 6. Ringkasan respon siswa mengenai penyebab terjadinya tindak kekerasan



Data selanjutnya yang diungkap adalah mengenai dampak terhadap perasaan siswa sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan guru. Tabel 7 menampilkan ringkasan data angket siswa.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa hampir 3% siswa merasa minder akibat tindakan yang dilakukan guru terhadap mereka; sebesar 38% merasa sakit hati; 49% merasa marah; 5% merasa sedih, dan hampir 1% mengatakan ingin balas dendam. Selanjutnya, kurang-lebih 4% siswa memberi jawaban beragam, dimana sebagian besar mengatakan biasa saja. Gambar 7 menampilkan ringkasan data respon siswa dalam bentuk *chart*.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui bahwa tindak kekerasan guru

Tabel 7. Ringkasan respon siswa mengenai dampak tindak kekerasan guru terhadap perasaan siswa

		bagaimana perasaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	minder	5	2.8	2.8	2.8
	sakit hati	68	38.2	38.2	41.
	marah	87	48.9	48.9	89.9
	sedih	9	5.1	5.1	94.9
	balas dendam	1	.6	.6	95.5
	lain	8	4.5	4.5	100.0
Total		178	100.0	100.0	

terhadap murid yang muncul atau dilaporkan mencapai 91% atau sebanyak 162 kejadian. Angka ini tergolong tinggi, yaitu 162 kejadian dari 178 respon subyek penelitian. Walaupun demikian, sifat dari angket yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan adanya multi-respon; artinya, subyek atau responden penelitian dapat memberikan lebih dari satu macam respon terhadap satu item. Seorang subyek mungkin mengalami bentuk kekerasan verbal, sekaligus juga kekerasan psikologis, ataupun kekerasan fisik.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah bentuk kekerasan verbal, termasuk di dalamnya adalah memberi julukan yang tidak disukai, memanggil dengan nama orangtua, serta memanggil dengan nama lain yang tidak sesuai, memberi label dengan menyebut 'malas', 'goblok', dan 'nakal'. Bentuk yang kedua adalah bentuk kekerasan psiko-logis, seperti mengabaikan atau tidak memperdulikan, serta melontarkan kata-kata yang tujuannya mengancam atau mengintimidasi, seperti 'awas kamu'. Selanjutnya, bentuk yang ketiga adalah kekerasan fisik, seperti menjewer, memukul, serta mendorong kepala.

Data juga menunjukkan bahwa kasus-kasus tindak kekerasan yang dilakukan guru, lebih banyak dilaporkan oleh siswa perempuan dibandingkan siswa laki-laki. Hal ini tidak dapat serta merta menggambarkan fenomena sesungguhnya; bahwa siswa laki-laki mengalami tindak kekerasan yang lebih sedikit dibandingkan perempuan. Beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut antara lain; 1) siswa laki-laki cenderung tidak melaporkan berbagai bentuk atau tindak kekerasan yang mereka alami, 2) siswa perempuan lebih banyak berinteraksi dengan guru mereka dibandingkan siswa laki-laki, sehingga memperbesar kemungkinan mereka menjadi obyek kekerasan guru; 3) siswa perempuan merupakan obyek yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan guru; 4) siswa perempuan lebih subyektif dalam menilai perilaku guru, dan dengan demikian,

keliru memaknai perilaku guru sebagai bentuk kekerasan atau tindakan yang secara sengaja bertujuan menyakiti mereka. Asumsi-asumsi tersebut memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih enggan melaporkan atau mengekspresikan hal-hal yang terjadi pada mereka dibandingkan perempuan. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh faktor budaya, dimana umumnya anak laki-laki dididik untuk meyakini bahwa mereka memiliki kontrol terhadap lingkungan dan dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada mereka (Kring, dkk, 2010).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Back & Lips (1998) menemukan bahwa laki-laki, dibandingkan dengan perempuan, cenderung memberi tanggung jawab yang lebih besar pada korban dalam kasus-kasus kekerasan. Perilaku 'mengadu' atau melapor pada orang yang lebih dewasa mengenai apa yang terjadi pada mereka juga sering dianggap sebagai bentuk perilaku yang 'tidak jantan' dan tidak pantas dilakukan anak laki-laki. Oleh sebab itu, perilaku diam atau tidak melapor dianggap lebih baik daripada mengadu. Sebaliknya, anak-anak perempuan kerap merasa lebih bebas untuk mengekspresikan atau melapor-kan apa yang mereka rasakan. Selain itu, Gustafson (1998) juga menemukan bahwa perbedaan gender berpengaruh pada penilaian terhadap realita. Laki-laki dan perempuan memiliki cara pandang atau persepsi yang subyektif terhadap realita, termasuk bagaimana menilai resiko lingkungan terhadap mereka.

Di sisi lain, perbedaan gender juga kerap menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian survey, sebab sering ditemukan perbedaan respon yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, laki-laki cenderung memberikan respon yang lebih rendah terhadap angket dibandingkan perempuan, sehingga *missing data* lebih banyak terjadi pada responden laki-laki daripada perempuan (Cull, dkk, 2005;

Korkeila, dkk, 2001). Dengan demikian, perbedaan gender perlu mendapat perhatian dalam menginterpretasi hasil-hasil penelitian survey.

Selanjutnya, penyebab munculnya tindak kekerasan guru terhadap siswa menurut survey diantaranya adalah karena kesalahan yang dilakukan siswa, temperamen guru, dan berbagai alasan lain yang merujuk pada perilaku siswa yang tidak disukai guru, seperti perilaku malas, ramai di dalam kelas, tidak memperhatikan, serta alasan yang tidak diketahui siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui pula apa yang dirasakan siswa sebagai dampak atau akibat dari tindak kekerasan guru terhadap mereka. Siswa diantaranya mengaku merasa minder atau rendah diri, marah, sakit hati, sedih, dan ingin balas dendam. Akan tetapi, ada pula siswa yang mengatakan biasa saja, atau dengan kata lain, tidak menganggap serius tindakan guru terhadap mereka.

Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa siswa merasa 'biasa saja' dalam menyikapi tindakan guru terhadap mereka. Pertama, siswa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak wajar, terutama dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan dengan maraknya tayangan kekerasan di media-media massa, termasuk televisi, internet, dan *game* atau permainan virtual yang menjadikan siswa terbiasa dengan perilaku-perilaku tersebut di lingkungan mereka.

Alasan yang kedua, siswa merasa bahwa mereka layak mendapat hukuman atas perilaku mereka. Sebagian siswa mungkin memaknai tindak kekerasan yang mereka alami sebagai bentuk hukuman atas perilaku mereka yang tidak pada tempatnya. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku yang memicu munculnya tindak kekerasan tersebut. Dengan demikian, siswa sebenarnya dapat mengenali perilaku yang secara normatif salah, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka tidak dapat

mengendalikan diri dan menghindari perilaku-perilaku tersebut. Salah satunya dapat disebabkan kurang efektifnya pengelolaan kelas, yang dapat dipengaruhi oleh tidak memadainya rasio antara guru dengan siswa dalam satu kelas. Hal tersebut senada dengan pendapat Pengawas Sekolah yang memberi rekomendasi mengenai karakter sekolah yang umumnya memiliki lebih banyak masalah kekerasan guru terhadap siswa, salah satu yang paling utama adalah sekolah-sekolah yang padat siswanya. Rata-rata siswa per kelas pada 5 SMPN yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 30 hingga 50 orang. Padatnya siswa dalam satu kelas, dapat memicu berbagai permasalahan dalam upaya pengelolaan kelas yang dapat berdampak pada perilaku siswa.

Lebih lanjut lagi, sebagian siswa mengatakan tidak mengetahui alasan munculnya tindak kekerasan guru. Hal ini antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, siswa keliru memaknai atau menilai perilaku guru terhadap mereka. Contohnya, perilaku mengabaikan atau tidak memperdulikan mungkin dilakukan guru untuk mengabaikan perilaku tertentu yang ditunjukkan siswa. Hal tersebut dilakukan misalnya, untuk menghindari penguatan yang keliru terhadap perilaku siswa. Memberikan reaksi terhadap perilaku siswa dapat menjadi bentuk penguatan yang keliru yang menyebabkan suatu perilaku berulang, padahal perilaku tersebut tidak diharapkan. Akan tetapi, siswa mungkin menilai bentuk pengabaian tersebut sebagai pengabaian terhadap diri mereka secara pribadi, karena alasan-alasan yang pribadi pula.

Kemungkinan kedua, sebagian siswa gagal mengenali perilaku mereka sendiri yang mungkin memicu munculnya reaksi guru. Hal ini berkaitan pula dengan kemungkinan ketiga, yaitu kemampuan guru dalam mengomunikasikan harapan mereka terhadap perilaku siswa, serta mendorong terjadinya perubahan perilaku. Sebagian guru mungkin beranggapan bahwa bentuk tindak kekerasan

sebagai bentuk hukuman merupakan metode yang efektif untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku negatif siswa. Di sisi lain, siswa kerap memerlukan penjelasan mengapa suatu hukuman dikenakan pada mereka, sebab mereka tidak mengetahui bahwa perilaku mereka salah, atau mereka tidak memiliki alternatif perilaku lain yang lebih tepat dalam menghadapi suatu situasi. Contoh, siswa menjadi cenderung ramai di kelas atau mencari kesibukan sendiri ketika tidak memahami penjelasan guru atau merasa tidak diperhatikan. Siswa perlu diberi strategi yang lebih tepat dalam menghadapi situasi tersebut. Kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa juga memegang peranan penting.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian survey ini kurang memadai untuk mendapat penjelasan menyeluruh mengenai tindak kekerasan guru

terhadap siswa. Adanya perbedaan respon yang cukup besar antara siswa laki-laki dan perempuan, mengindikasikan perlunya memahami pengaruh faktor jenis kelamin dalam memahami fenomena ini. Penelitian lanjutan mengenai hal tersebut dapat memperkaya hasil penelitian ini.

Penelitian mengenai penyebab dari tindak kekerasan guru terhadap murid juga tidak dapat dijelaskan dengan memadai jika hanya memperhitungkan perspektif atau sudut pandang siswa. Selain itu, keterbatasan angket sebagai alat utama pengumpul data dalam penelitian survey, terutama berdampak pada kedalaman informasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena ini. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap guru dan siswa dapat menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Back, S., & Lips, H.M. (1998). Child Sexual Abuse: Victim Age, Victim Gender, and Observer Gender as Factors Contributing to Attributions of Responsibility. *Child Abuse and Neglect* 22(12), hlm. 1239-1252
- Berkowitz, L. (1993). *Emotional Behavior*. Mc. Graw-Hill Inc.
- Covey, S. (1998). *The 7 Habits of Highly Effective Teens*. New York: A Fireseide Book.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. London: Sage Publications Ltd.
- Cull, W.L., O'Connor, K.G., Sanford, S., Tang, S.S. (2005). Response rates and response bias for 50 surveys of pediatricians. *Health Service Research* 40(1), hlm. 213-226
- Dollard, J. & Miller, N.E. (1950). *Personality and Psychotherapy*. New York: Mc.Graw-Hill.
- Gilligan, J. (1996). *Violence as Tragedy*. New York: Vintage Books.
- Gustafson, P.E. (1998). Gender differences in risk perception: Theoretical and methodological perspectives. *Risk Analysis* 18(6)
- Jawa Pos, 17 Oktober 1997
- _____, 25 April 2002
- _____, 27 April 2002
- _____, 21 November 2007
- Korkeila, K., Suominen, S., Ahvenaine, J., Ojanlatva, A., Rautava, P., Helenius, H., Koskenvuo, M. (2001). Non-response and related factors in a nation-wide health survey. *European Journal of Epidemiology* 17(11), hlm.991-999
- Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 1997.
- Kompas, 27 Juli 2005.
- Media Indonesia, 28 Nopember 2006.
- Smith, J.M. & Lusteran, D.D. (1979). *The Teacher As Learning Fasilitator*:

*Psychology and The Educational
Process.* California: Wadsworth
Publishing Company, Inc.

MARTYRDOM AND THE PROCESS OF RADICALISATION AMONG YOUNG MUSLIMS IN INDONESIA: SOCIAL IDENTITY THEORY PERSPECTIVE

Muhammad Syafiq

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya

e-mail: syafiq_muh@yahoo.com

Abstract: *The phenomena of suicide attacks targeting overseas people or properties in Indonesia carried out by Indonesian young Muslim seem to be elusive. Different to Palestinian and Middle Eastern contexts where acute conflicts are taking place, there were no celebrations to martyrdom in Indonesia. Majority of Indonesian Muslims not only reject suicide bombing or martyrdom but also condemn it. Indonesian suicide bombers' families, that is not like those of Palestinian martyrs, were not proud of their member's deed and will not get pride from their neighbourhood. They will not get financial advantages because of family's member sacrifice as well. So, what are the reasons that make Indonesian young Muslims chose to die as a martyr? This article aims to explain the process of radicalisation among young Muslims and reveals the causes and backgrounds of young martyrs in Indonesia based on Social Identity Theory (SIT). Findings of many studies on religious motivated violent attacks are used as comparisons.*

Keywords : *Terrorism, youth, radicalisation, martyrdom.*

In the early morning of July 17th 2009, two separated blasts hit Ritz-Carlton and J.W. Marriott Hotels, Jakarta. Indonesian police then announced that the blasts were suicide bombings of two terrorists named Nana Ikhwan Maulana (28 years) and Dani Dwi Permana (19 years). Seven people were killed and more than 50 others were injured in these attacks. Formerly, two Bali bombings occurred on October 2002 and October 2005 and killed more than 200 people. The profiles of both perpetrators of terrorist attacks on Ritz-Carlton and J.W. Marriott Hotels, according to Davis (2010), corroborates a historical profile for radical Muslim extremists in Indonesia. He stated that most actors of terrorists attacks in Indonesia are young, male, single, and little or no education.

Studies on terrorist profiles has been carried out by many social scientists including psychologists. Horgan (2003) reviewed many psychological literatures on terrorism in the periods of 1970s-1980s and found that it was common in the earliest psychological studies that terrorists are viewed as people who suffer from mental disorder, frustration, or narcissism.

However, recent studies show that

terrorists have normal psychological characteristics. Based on many literatures and research findings on Palestinian suicide bombers, Silke (2003:94) concluded that '*there is no indication that suicide bombers suffer from psychological disorder or are mentally unbalanced.. In contrast, their personalities are usually quite stable and unremarkable (at least within their own cultural context)*'.

Based on videos revealing confessions of three perpetrators of second Bali Bombings on October 1st 2005, Indonesian psychologist, Sarlito Wirawan Sarwono, concluded that they cannot be categorized as psychopaths. Sarwono (2007:3) said: '*they love, are devoted and are responsible to their families, they expressed normal emotion, they are able to show empathy, they behave politely, they avoid rude vocabulary in their speech, and ...have never committed a crime.*' He stated that rather than become the real actors of terrorism, Indonesian suicide bombers are the victims of indoctrination. He stated that candidates of suicide bombers generally are recruited among young people who are ambivalent, disoriented and social-psychologically isolated or, in his terms, are

'empty mind' (Sarwono, 2007: 3). The suicide bomber candidates viewed as the ones who have no intellectual ability to counter the recruiters' radical Islamic ideology.

However, Silke (2003) rejects the idea of brainwashing or indoctrination as the main factors of individual's decision to be a martyr. He noted that in the context of Palestine, most suicide bombers are volunteers who chose consciously to be a martyr although other alternatives remained open to them.

The idea of indoctrination as the cause of the youth's involvement in terrorism is apparently rooted in Erickson's concept of identity crises. According to the perspective, we can assume that young suicide bombers were easy to be recruited because they were suffering from ambiguity, fragmentation, and isolation. Young people that suffer from such crises tend to seek totalitarian collective identities that promise certainty, and radical terrorist group is one of the choice.

However, if the collective cultural background of Indonesian people is taken into consideration, it will be important to scrutinize whether young Indonesian Muslims who are living in collective Indonesian culture have periods of identity crises?

Local Culture as a Determinant Factor

Reflecting on Palestinian suicide bombers, Grosbard (2008) argued that in traditional-collectivistic cultures, parents have important roles to make decision on their children. This tends to make adolescent periods in traditional collective society remains peaceful. Then, in this collective traditional society, Grosbard (2008: 147) said: *'there is no individual identity search, and usually rebellion which defines the self is out of the question'*.

Individuals who live in collective society usually have a more dominant external locus of control than internal ones. Their motivation and behaviour then will be influenced more by situational factors rather

than by their internal factors. Therefore, the ways Indonesian suicide bombers were recruited will elicit a valuable information about their motivation.

In the case of 17 July bombings, police investigators revealed Syaifudin Zuhri as the man who recruited Dani and Nana. According to Osman (2009), Syaifudin searched his targets in Mosques that are visited by many university students and he would take a time to engage with them intellectually. Syaifudin's target, then, basically is a curious, intelligent young man. Therefore, the candidates of Indonesian suicide bombers less likely have 'empty mind' or be brainwashed or indoctrinated by terrorist groups. They chose to be a martyr based on self awareness as showed in the video recording of Dani's confession: *'it will scare them, America and Australia will be destroyed, so this is not suicide'*(Aljazeera TV programme "witness", 2010).

If it is true that the candidate of suicide bombers choose to be a martyr voluntarily and consciously, so what is social psychological mechanism behind their decisions? In fact, not all members of radical group choose to die as martyr, so the path from joining radical groups to martyrdom is not a simple transformation. Social identity theory (SIT) will be an appropriate tool to explain how Indonesian young Muslims join radical groups and choose to die as a suicide bomber.

The Construction of a Radical Group's Collective Identity

Social identity theory (SIT), according to Hogg & Abrams (2003), asserted that we will define and evaluate ourselves based on groups to which we belong. SIT addressed how groups membership leads to the formation of social identities together with its emotional and value significance. According to SIT, Individuals are motivated to identify themselves with their groups and seek positive self-esteem and self enhancement by

distinguishing their ingroup from outgroup.

Social Identity Theory (SIT) consists of Tajfel's original social identity theory and Turner's social categorisation theory. The former explain how groups membership leads to the formation of social identities together with its emotional and value significance, the latter examine ways in which social identities operate as social categories in self concept in the context of intergroup dynamics including stereotype and prejudice (Herriot, 2007).

Herriot (2007) has applied SIT to study religious fundamentalism specifically focus on the cases of 9/11 hijackers and Anglican Church. According to Herriot, religious identity seems to be prominent in religious fundamentalism both in Islam and Anglican Church. In those cases, religious identity was constructed around the sacred worldview so that if the believers sense their identity is threatened in the context of intergroup conflicts, their reactions that are often violent will be sacralised in religious terms. In fact, religion has the power to morally justify any actions and promises an eternal reward in heaven to the true believers (Kinvall, 2004).

Based on the arguments, we can argue that for some young Muslims, all Muslims in the worlds are in-group. Self identification to all Muslims around the world make youth's religious identity is more salient than their other identities. In this condition, young Muslims will be moved emotionally if there are conflicts in the Muslim areas which involved out-groups, especially in the condition Muslims are oppressed and suffering. They will feel grievance for Muslims and angry to enemies. In this conditions, radical groups find a fertile soil where they can deliver their messages and invite young Muslims who are eager to fight for changing their groups' conditions to support and even join into the group. Thus, the radicalisation of young Muslims is the process that created by radical groups by spreading radical ideology from which they can find supporters and, then, /select and recruit their

members.

In the light of SIT, the first step to explain the process of radicalisation among Indonesian young Muslim is to reveal how they identify themselves into their groups and which out-groups they identify as competitors or enemies. Richardson (2006) stated that terrorist organization usually mobilizes a single shared identity to recruit their members. Post (2005) has also showed the importance of emphasising on collective identity as foundation of terrorist psychology. To answer how collective identity based on Islamic religion campaigned and mobilised by radical groups in Indonesia, we have to look at the recent condition of Indonesian Muslim society as general.

Being the highest Muslim population in the world, Indonesian Muslims, together with other Muslims in the Southeast Asia region, were previously described as having, in Mehden words, '...a greater reputation for pluralism, flexibility, and tolerance than that found in the Middle East' (Mehden, 2005:3).

However, compare to the earlier years, Indonesian Muslims today are more aware of what happening in Islamic world and tend to sense that Islam now is under attack of outside forces so that they are, Mehden said: 'more fully identify themselves with global Islamic community' (Mehden, 2005:3). This global Islamic community is best termed in Islamic perspective as '*ummah*' which is means, according to Watt (1956: 242), 'the religious community of Muslims.' Normally, all Muslims in the world are parts of *ummah* that are bound by the same religion, however not all Muslims feel the same degree of sentiment and solidarity as one *ummah*.

In this situation, when devout young Muslims meet radical groups that tell them the groups are struggling to counter-attack the enemies to defend religious community or *ummah*, we can predict that they will attract to the groups. Roy (2004) stated that a radical Islamic group is so attractive because it claimed themselves as the vanguard of

ummah. Although the role of *ummah* here is just as, in Roy terms: 'an imaginary and therefore silent community that gives legitimacy to the small group pretending to speak in its name' (Roy, 2004: 200).

The Process of Radicalisation

Radicalisation defined by McCauley & Moskalenko (2008:416) as : '*change in beliefs, feelings, and behaviours in directions that increasingly justify intergroup violence and demand sacrifice in defense of the in-group.*' The function of radicalisation, according to them, is to intensify readiness and commitment to intergroup conflicts. In the context of terrorism in Indonesia, radicalisation is closely related to armed struggles in the contexts of real or imagined intergroup conflicts between Muslim and its enemies.

The process of radicalisation can be more understood clearly when we consider "the staircase to terrorism" explained by Moghaddam (2005). According to Moghaddam, becoming a terrorist is not an automatic process. It needs many steps that require terrorist candidates to climb gradually through some stairs.

Moghaddam (2005) stated that there are at least six levels or "floors" leading to terrorist acts. In the lower level or ground floor, there are perceptions and feelings of injustice and deprivation among people. Then, some individuals who think and feel that they should try to get solution will climb to the higher level (first floor). In this level, they do some efforts to seek the ways to make their situation better and claim their justice. The failure to succeed in the first level will make individuals keep climbing to second level.

In the second level, individuals bring the feeling of anger, hate, and frustration with them and are vulnerable to be influenced by some leaders to displace the negative feelings onto common enemy. Some individuals who are prone to act aggressively to "the enemy" as a displacement of their anger and frustration

will move higher to third level.

In the third level, the belief that physical violence can be used to punish "the enemy" and achieve their goals become more stronger. Because of the belief in the violent strategy, in this level individuals experience, According to Moghaddam (2005), the most important transformation, namely they begin to engage with the morality of terrorist organisations and justify violent offences as legitimate strategy. Some individuals in the third level, then, become more fully engaged with the terrorist morality and are ready for recruitment.

The fourth level is occupied by individuals who have already recruited as an active terrorist. They have been radicalised so that they see their terrorist organisation as legitimate and categorised the world rigidly into "us-and them", "black and white".

In the last level, specific members among the active terrorists are selected and trained to become "the chosen ones" who are ready to killing both others and themselves. Martyrs or suicide bombers, according to Moghaddam, are in this highest level.

The Path to Martyrdom

As stated by Moghaddam (2005), individuals who are equipped and sent to undertake terrorist acts and are ready to kill others and even themselves are selected and trained active terrorists. Young people are prone to influenced by leaders to do physical violent acts to attack common enemy. Joining radical groups that proclaim they have legitimacy from *ummah* to fight against enemies, make young Muslims feel themselves as a chosen person to perform religious duty. In this step, the role of small underground terrorist group is very essential to urge its members to take extreme actions.

The perception of being threatened by others will make members of radical groups very cohesive, and this cohesiveness will be more intensive when the group is smaller. In this condition, McCauley & Moskalenko said:

'the group's consensus about value and morality acquires enormous power, including the power to justify and even require violence against those who threaten the group' (Mccauley & Moskalenko, 2008: 423).

In this high cohesive small group, a personal interest of its member will be less important compare to collective group interests. All members will act and behave based on in-group norms and even be ready to sacrifice themselves for the group and ideology. In this level, the group ideology will gain its most powerful influence.

The radical Islamic organisation in Southeast Asia named Jemaah Islamiyah (JI) was responsible for most terrorist attacks in Indonesia (Abuza, 2009). JI has affiliation to Al-Qaeda and shares the same ideology called Salafi-Jihadism (Abuza, 2009). International Crisis Group (2004: 32) define Salafi Jihadism as 'a fringe element of salafism determined to target Islam's enemies through violence, aimed in particular at United States and its allies'.

The followers of this ideology differs from mainstream salafi Muslims in that they believe violent jihad is a legitimate way to fight their perceived enemies (Hooker and Fealy, 2006: 5). Globalisation enables the spread of this ideology to various parts of the world, including Indonesia, by facilitating the development of a religious identity based on a 'global ummah' united by awareness and concern for the perceived injustice and oppression of Muslims (Roy, 2004; Staunton, 2008). The 'Salafi Jihadi organisations act on these feelings of injustice by choosing to commit terrorism against perceived oppressors.' (Staunton, 2008:145).

According to Moghadam (2008) *Salafi Jihadi* admire martyrdom as a an manifestation of supreme devotion to God. The confession from one of terrorists involved in 2003 J.W. Marriott bombing in Jakarta supports this argument:

'Based on the *fatwa* [of Osama bin Laden urging attacks on the US and its

allies], we wanted to defend the Muslim faithful who were being oppressed by the people of the US, England, Australia and Israel, by undertaking acts of terror aimed at facilities owned by Americans, British, Australians or Israelis in the hope that these acts would cause loss of life and property and strike fear into the hearts of the people of those countries.' (ICG, Asia Briefing N°94., 2009: 4)

It is not surprising, then, if some young extremist Muslims, as members of terrorist groups, also admire martyrdom as their ideals because martyrdom is their highest group norm. However, making decision to be a martyr is different to committing martyrdom. It needs strong mentality and perseverance for a young man to blow himself without fear. Pedahzur (2005) said that terrorist groups use two effective mechanisms to solve this issue. Firstly, if the candidates have decide to be a martyr, the recruiters will make a short video of a candidates' last statement prior to their mission. After this video shooting, the candidates will be praised by their comrades as a living martyr or 'a bride'. Secondly, the recruiters will guide the candidates personally to carry out intensive religious rituals to prepare them enter to a heaven. Both mechanisms become the guarantee that the "brides" will not set back from their mission.

CONCLUSION

Terrorism in Indonesia is a part of global terrorism. Therefore, Indonesian suicide bombers' motivation generally is sourced from global Muslim community issues. Indonesian young Muslims sense themselves as a part of global religious Muslim community. As they perceive their Muslims community are invaded by outsider forces, they are eager to participate and give contribution to defend their radical in-group's interests which are certainly claimed by the radical group as the interests of *ummah*. This sentiments of Indonesian young Muslims to global Muslim

community or *ummah* make them attracted to radical groups. To recruit them, a terrorist group try to raise their spirits, strengthen their motivation to fight for Islam, give religious justification, and then train the candidates the ways to undertake terrorist acts.

The process of transformation from young radicals into the candidates of martyrs is primarily depend on small radical terrorist

group processes. The structure of the groups and dynamic interaction between its members determine the roles each members have to play. Candidates of the martyrs must be the most loyalist members who are ready to sacrifice their lives on behalf of group ideology. The ideology of Indonesian terrorist groups is sourced from *Salafi Jihadism* that praises martyrdom as an effective strategy.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Zachary (2009). The Rehabilitation of Jemaah Islamiyah Detainees in South East Asia: A Preliminary Assessment. In T. Bjorgo and J. Horgan (Eds.). *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. New York: Routledge. pp. 193-211
- Aljazeera. (2010). TV programme "witness". <http://english.aljazeera.net/programmes/witness/2010/08/201081664431710754.html>.
- Davis, Drew, (2010). *Al-Qaeda in the Malay Archipelago: A Case Study of the July 2009 JW Marriott & Ritz-Carlton Bombings in Jakarta, Indonesia*. <http://www.paxamerica.org/wp-content/uploads/2010/03/CASE-STUDY-The-July-2009-JW-Marriott-Ritz-Carlton-Bombings-in-Jakarta.pdf>
- Grosbard, Ofer (2008) The Drama of the Suicide Terrorist, in M. Sharpe (Ed.), *Suicide Bombers: Psychological, religious and Other Imperatives*. Amsterdam: IOS Press. p.145-150.
- Hogg, M.A. & Abrams. D. (2003). Intergroup Behavior and Social Identity, in M. A. Hogg & J. Cooper (eds.). *Handbook of Social Psychology*. (pp.). London: Sage.
- Hooker, V. and Fealy, G. (2006). Introduction to the Sourcebook, in V. Hooker, and G.. Fealy, (Eds.). *Voices of Islam In Southeast Asia: A contemporary Source Book*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Horgan, John (2003) The search for the Terrorist Personality, in Andrew Silke, (ed.) *Terrorists, Victims, and Society: Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences*. West Sussex: Jon Wiley & Sons Ltd., pp.5-16.
- Horgan, John (2008). Deradicalisation or disengagement?. *Perspectives on Terrorism*, 2(4): 3-8. Available at: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/articles/issues/PTv2i4.pdf>
- International Crises Group (ICG) (2004) Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix. *Asia Report No. 83*. Brussels: International Crisis Groups. http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Islam/83_indonesia_backgrounder_why_salafism_and_terrorism_don_t_mix_web.pdf
- International Crises Group (ICG) (2009, 24 July). *Indonesia: The Hotel Bombings*. Asia Briefing N°94. Jakarta/Brussel. <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B94-indonesia-the-hotel-bombings.aspx>
- Kinnvall, Catarina (2004). Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Security. *Political Psychology*, 25(5):741-767.
- McCauley, C. & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of Political Radicalisation:

- Pathways Toward Terrorism, *Terrorism and Political Violence*, 20:415–433.
- Mehden Fred, R. Van Der. (2005). *Radical Islam in Southeast Asia and its Challenge to U.S. Policy*. James Baker III Institute for Public Policy of Rice University.
- Moghadam, Assaf. (2008). *The Globalization of Martyrdom: Al-Qaeda, Salafi Jihad, and the Diffusion of Suicide Attacks*. Maryland: The John Hopkins University Press.
- Moghaddam, Fathali. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. *American Psychologist*, 60 (2), 161–169.
- Osman, Sulastri. (2009). *The Fatal Allure of Extremist Logic: Syaifudin Zuhri and the July 17 Suicide Bombers*, RSIS Commentaries, Nanyang Technology University Singapore. Available at: <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1042009.pdf>
- Pedahzur, Ami (2005). *Suicide Terrorism*. Cambridge and MA: Polity.
- Post, Jerrold M. (2005). The Psychological and Behavioral Bases of Terrorism: Individual, Group and Collective Contributions. *International Affairs Review*, 14 (2), 195-204. http://www.iaar-gwu.org/files/2005/FW05_Spotlight.pdf
- Richardson, L. (2006). What terrorist want. Understanding the terrorist threat. London: John Murray.
- Roy, Oliver. (2004). *Globalised Islam: The Search for a New Ummah*. London: Hurst & Co. (publishers) Ltd., p.200.
- Sarwono, Sarlito W. (2007). *What is in their minds?: The psychology of suicide bombers in Indonesia*. <http://www.victoria.ac.nz/nz-iaa/assets/talks/wn/What%20is%20in%20their%20Minds%208%20November2007.pdf>
- Silke, Andrew (2003) The Psychology of Suicidal Terrorism, in Andrew Silke (ed.). *Terrorists, Victims, and Society: Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences*. (pp.94-). West Sussex: Jon Wiley & Sons Ltd.
- Staunton, Dick (2008). The Clash of Identities: An Analysis of The Causes of Salafi Jihadi Terrorism with Reference to Jemaah Islamiyah, *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 8(1): 142-164.
- Watt. Montgomery. (1956). *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon.

MAKING SENSE OF ETHNOGRAPHY: FROM AN OUTSIDER PERSPECTIVE

Siti Ina Savira

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya

e-mail: inasavira@yahoo.com

Abstract: *This paper is aimed to compare two ethnographic works Learning to Labour, and Masculinity Beyond the Metropolis. The comparison is expected to illustrate how to make sense ethnographic work as a research methodology with its various types of epistemology and approach. The review will begin with a brief outline of the studies as described in each book and follow with further elaboration directed by several headings that covers Crotty (1998) four elements, namely epistemology, theoretical perspective, methodology, and method. It will also discuss the knowledge and values, and the theory of culture of each study.*

Key words: *Ethnography, knowledge, culture.*

The first ethnographic work being discussed here is the one conducted by Willis (1977). Willis' work consists of one main case study and five comparative case studies. As comparison, Masculinity beyond the metropolis, conducted by J. Kenway, A. Kraack, and A. Hickey-Moody, is a multi-site ethnographic research. Both studies emphasised on participant observation as the main method of data collection, and therefore, claimed to be ethnographies. Both works also interested in young males culture; in fact Kenway, et al., (2004) was referring to Willis's (1977) as one of early ethnography research that gives valuable information on masculinity.

Willis study (1977) was conducted in 1972-1975 and was particularly interested at working culture, more specifically the transition of 'young non-academic disaffected males' from school to work force. He claimed to use qualitative method, case study, interview, group discussion, and participant observation and that the use of ethnographic format is unavoidable because of the nature of the topic in the study, which was about culture. Ethnography, according to Willis (1977), is the best method for the study because, most of all, it allow the respondents to speak for themselves and reach directly to the audience of the study.

The study wished to be able to explain the process of regeneration of the working class, how do young males adopt their roles, the values and culture, and how they perceive themselves in relation to others. The study found that the values and culture that they embrace were dominantly influenced by capitalism and patriarchal culture, where masculinity is perceived as superior. Young non-academic males believe that the men job is the physical job outside of the house. They consider mental works as girlish, so as engaging in school or being academic, since that means, according to them, is being passive. Masculinity also leads to superior and unfair view toward females. These values and culture are something they adopt from what they perceived as environment expectation of them. Therefore, to understand fully about counter-school culture, Willis (1977) concluded that outsiders' perspective is required.

Willis (1977) found that there is a space in cultural system that allows penetration or change. Therefore, he made some suggestion to approach the society to show them how culture can tell about who they are. Vocational education and classroom pedagogic strategies are called out to contribute in modifying perceived culture of the working classes.

The second study, Kenway, et al., (2004) study aimed to explore the effect of

globalization in non-cities or not densely populated places in Australia, particularly on young males by focusing on their personal experience toward globalization that influence their identification of masculinity. The research involved three years of participant observation at natural setting fieldworks that involved four different places in Australia that further described and referred to as 'out of the way places'.

In each place, 36 young people were engaging in in-depth semi-structured interviews. Individual interviews to 24 young males and 12 young females aged 13 to 16 years old were conducted every week for six weeks periods. More informal conversation and some group discussions were also conducted toward parents, community members, teachers, and welfare service providers. Besides collecting observational data on the habits and the dynamic in the community as social organization, the data collection sources also covered documentaries on histories and government statistical data banks. Another source was derived from popular media and marketing representations of those places under study that give information about how masculinity and changes were represented. This type of source, according to Kenway, et al., (2004) is not common in ethnography. Furthermore, how Kenway, et al., (2004) defend their study trustworthiness will be embedded in more detail within the next section of this paper.

Compare and contrast based on Crotty's four elements

This section will discuss both works based on four elements as suggested by Crotty, namely epistemology, theoretical perspective, methodology, and method.

1. Epistemology

Epistemology can be defined as a way of making sense of what we know (Ambert, Adler, Adler, & Detzner, 1995) by 'explaining

how we know what we know' (Crotty, 1998). Epistemology implies the researcher beliefs about the nature of knowledge, therefore will determine the type of question and method he/she decided to use (Ambert, et al., 1995).

The two studies discussed here used two different epistemologies. Willis (1977) believes that the issue that he was interested in, which was labouring and the working class of 'young non-academic disaffected males' could only be understood from the insider point of view. He stated that 'Labouring is not a universal transhistorical changeless human activity. It takes on specific forms and meaning in different kinds of societies' (Willis, 197, p. 2). He represents the data he collected from interviews with key persons to show how he tried to make meanings out of it.

Therefore, I concluded that Willis (1977) was leaning toward constructionism, more specifically social construction. Constructionism can be understood as the view that believes 'that all knowledge, and therefore all meaningful reality as such, is contingent upon human practices, being constructed in and out of interaction between human beings and their world, and developed and transmitted within an essentially social context' (Crotty, 1998, p. 42).

This approach of epistemology is quite different from Kenway, et al., (2004). Although, like Willis's (1977), epistemology did not explicitly stated in the book, it can be assumed that Kenway, et al., (2004) epistemology is deconstruction. Kenway, et al., (2004) introduced the issue in the book by giving examples of how people commonly understand, or perhaps, misunderstand the 'places outside of densely populated cities', which he further describes as 'variously marginalized, stigmatized, pitied and patronized, romanticised and exoticised' (Kenway, 2004, et al., p. 3). The book raises an argument that such representation came from an overgeneralization of phenomenon by describing only the big picture and pattern of globalization, and analysing only particular

aspects of globalization, particularly those aspects that seem to stand out or dominate and new and avoid the domain that requires ethical consideration and 'subjective' interpretation, such as personal experiences. The complexity of the phenomena would lie in the interpretation of the context and to make meaningful contradictories that may emerge from individual's point of view toward globalization as result of the dynamic interaction between people and place, for instance in places outside of densely populated cities, and how it affects the identification of manhood and masculinity. The book claims that research with deductive reasoning would tend to simplify context by generalizing and abstracting phenomena and therefore, failed to explain the complexity. The book claims to provide new way in understanding and analysing globalization and masculinity.

Deconstruction is built on the assumption that there is no final truth or pure objectivism, that meaning should be understood within the context that we choose to interpret and that it is dynamic and situational (Cilliers, 2005). Deconstruction argues about the complexity of finding meaning and that it should be understood within such complexity or without reducing or simplifying it, such as quantifying it. Therefore, to find meaning is to deal with 'normative and ethical domain' (Cilliers, 2005, p. 259), and that such attempt to generalizing or abstracting phenomenon would mean 'ethical emptiness' (Kenway, et al., 2004). Seale (2012) defines deconstruction as an approach that purpose is to challenge mainstream theory by providing alternative explanation or different view point as opposed to authority by representing social actors view points as well as the researchers' themselves.

2. Theoretical perspective

Theoretical perspective or the lenses through which researcher grounds their

criteria and context of both studies is interpretivism. Interpretivism argues that reality is a social construction rather than objectively determined (Kelliher, 2005; Walsham, 1995). Interpretivism requires researcher to interact with their human subject to build meaning, which will be reflected on the methodology and method. More specifically, Willis (1977) used symbolic interactionism to derive his interpretation to what his respondents were saying. Symbolic interactionism requires researcher to be fully immerse into the society that they study in order to be able to understand their perspective, value, and culture (Crotty, 1998).

Two major theories that Kenway, et al., (2004) used are masculinity and globalization (p.4). Although the study introduced some pre-existing research and theories on masculinity and globalization, the purpose of the study was not to test the theories but rather to build meaning from the human subjects they were going to observe in the fieldwork. The theories were useful to show the gap in existing literatures and clarify the links of elements being studied (Ambert, et al., 1995). For instance, Kenway, et al., (2004) found that existing theories and literatures had failed to recognize the uniqueness of the place and the people in understanding globalization, particularly how it affects how they identify themselves and others. They also theoretically explain and justify how masculinity related to globalization. However, unlike positivistic research, the theories would not limit or determine the analysis and the findings of the study.

3. Methodology

Although both studies are ethnography, each used different strategy in approaching the issue they were interested in. Willis (1977) was using one main case study and five comparative studies. Willis (1977) argued that ethnography is best suited to his needs in the study because it has 'a sensitivity to meanings and values as well as an ability to represent

and interpret symbolic articulations, practices, and forms of cultural production', it also allow 'human agency within the object of study' to permeate to analysis and the readers (p.3).

Kenway, et al (2004), however, specified their methodology as global ethnography, in particular is place-based ethnography. Kenway, et al., (2004) provides an extensive justification for their approach in chapter 2. They elaborate discussion about globalization and ethnography, how both are often considered as 'mismatched' and how to address this issue. They concluded there are three points that global ethnography must achieve. First, it must be sufficiently rich to capture the movement or changes of space, time, place, and identity. This can be achieved by including in the analysis some considerations toward 'large-scale economic and cultural shifts and influences, their social and cultural manifestations in place and space, and their implications for identity and the imagination'(Kenway, et al., 2004, p. 50). This notion aligns with Ambert, et al., (1995) about 'validating' qualitative research. Particularly in ethnography, providing thick description (Geertz, 1973) or adequate description (Silverman, 1985), representing many layers of realities and conducting many observations (Kirk and Miller, 1986) or collecting multi-source of data collection can help increase the trustworthiness of the study (as cited in Ambert, et al., 1995, p.885).

Second, ethnography 'must include theories and techniques that help to make sense of complex, uneven, and diverse globalizing trajectories and local-global', and allow the comparison on its manifestation (Kenway, et al., p. 50). In addition to that Ambert, et al., (1995) also suggest that a qualitative research should at least explicitly describe detailed approach and strategy they adopt in their research. And finally, ethnographers must expand the field of their study to be able to capture a more precise definition of globalization. Ambert, et al.,

(1995) argues about the importance of involving 'adequate sample'. A qualitative researcher must have a sensitivity to recognize the complexity of the study to determine 'the size and parameter of the sample'. Kenway, et al., (2004) also discuss about ethnography and masculinity by elaborating supporting notions about the contribution of ethnographic work in understanding masculinity.

4. Method

The method used in both studies is quite similar, where it involves participant observation, interviews, and group discussion. However, Kenway, et al (2004) also used documentary analysis, such as historical documents and government statistical data, and some analysis on media sources that represents masculinity, gender issues, and change. The latter, as admitted by Kenway, et al., (2004) is out of convention. However, Kenway, et al., (2004) argue that media cannot be taken away from discussion on globalization, since it is one of globalization mean to spread.

The Knowledge and its Value

Willis (1977) study has become one of important work in ethnography particularly in masculinity and schools. The study was trying to understand the transitional process of young non-academic disaffected males from school culture to working culture. It tried to understand how and why do these young males take on their identity of masculinity in relation to labour or working class. The study was conducted as the boys were at their last year of school and their first year outside school. The study findings were extensive, including some understanding on the values and culture the boys adopt that recognized as 'counter-school culture' and how capitalism affect their values of masculinity and their perceived role of being part of a working class.

The study tried to raise awareness about the importance of the school as media from

which an action toward a cultural system can be done. Willis (1977) argues that school has a significant role to influence change of the 'counter-school culture' of young non-academic disaffected males. Vocational education and classroom pedagogy strategy, for instance, are some means to approach such culture.

The study of Kenway, et al., (2004) was based on the argument that there were not many research or literatures that tried to link or explain how masculinity and globalization are related to one another, despite the huge amount of research that has been conducted on each topic. Therefore, masculinity has little understanding about globalization and vice versa. One reason is because previous research on globalization emphasising on making generalization and abstraction and in result, ignoring the unique context of the people and the place. They also criticised 'metrocentric' view in analysing masculinity and globalization that resulting in marginalizing out-of-way-places. Therefore, their study was conducted based on place-based ethnography that aimed to raise issue of 'unevenness' of globalization as it has not yet been captured by previous theory on globalization.

As a research method, they expect the study to be an example of applying place-based global ethnography that covers the discussion on critical ethnography, particularly in discussion on masculinity and globalization. They also predict that the study would raise question about the 'role of the imagination in social life' and the role of the media that often serve as a tool of imagining place and global connections between places with similar global issues.

Theory of Culture

Ethnography is closely associated with cultural studies; that is, a research that investigate the ways of how people use 'culture' as way of life in social context, and of ways in making culture (Gray, 2003).

Although it is not explicitly stated, the theories of culture used in each book will be described briefly.

The two studies have a similar theory of culture in a way that they both believe that culture is socially constructed. However, Willis (1977) was particularly interested in a specific culture that he referred to as 'counter-school culture' and tried to understand it from the insider's point of view, that is, the young non-academic and disaffected males. He tried to understand how this particular group perceive their own culture of gangs and as opposed to 'school culture' or 'formal culture'. He tried to capture their values and attitudes and what that means to them, for instance, drinking during lunch time, being sexually active and attractive, being part of a gang or 'the lads', smoking, and so on.

Kenway, et al., (2004), on the other hand, was trying to give a different perspective in understanding culture as affected by globalization, which they claimed have not yet sufficiently discussed. Kenway, et al., (2004) argues that place and space are important in understanding culture, since both are the intersections of the past and the present. Within space and place also that young males are linked to the global spaces in terms of multiple forces, imagination, and connection, as outlined by Massey's (1994) concept of spaces and place where they would continually rethink and reshape their identity. Globalization has become an influence that informs and links people and places, however not in that similar or general huge context, but rather as something that young males draw on in their context of space, time, and place in order to make identification of who they are, particularly on issue of masculinity. Therefore, the media became an important part of globalization that allows 'imagination' of the places beyond where they live. Culture, therefore, is socially constructed and dynamic.

CONCLUSION

Ethnography, as shown by both study, is a valuable methodology to explore in depth a particular culture within a particular context and society. The information generated from this methodology can be very extensive beyond theoretical framework. It is also apparent that the sensitivity in data collection and the interpretation skill of the researcher are crucial to have an adequate analysis over massive data collected from an extensive period of time and report it in interrelated and comprehensive way.

In comparison, although both studies discussed in this paper are ethnographies, but

both were using different approach and purposes. Both studies showed that ethnography is an adequate methodology in research and that it can contribute to theoretical and practical development. Kenway, et al., (2004) in particular, had presented their study with arguments to justify ethnography as an appropriate methodology for the study. The studies also shown the major opportunity for many approaches in ethnography to be developed depending on the issue being investigated and that it depends on the researcher to best utilize that opportunity.

REFERENCES

- Ambert, A., Adler, P. A., Adler, P., & Detzner, D. F. (1995). Understanding and evaluating qualitative research. *Journal of Marriage and Family*, 57(4 (Nov., 1995)), 879-893.
- Cilliers, P. (2005). Complexity, Deconstruction and Relativism. *Theory, culture, and society*, 22, 255-267. doi: 10.1177/0263276405058052
- Crotty, M. (1998). *Foundations of social research*. London: SAGE Publications.
- Gray, A. (2003). *Research practice for cultural studies*. London: SAGE.
- Kelliher, F. (2005). Interpretivism and the pursuit of research legitimisation: An integrated approach to single case design. *The electronic journal of business research methodology*, 3 (2), 123-132.
- Kenway, J., Kraack, A., & Hickey-Moody, A. (2004). *Masculinity beyond the Metropolis*: Palgrave Macmillan.
- Seale, C. (2012). *Researching Society and Culture* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE.
- Walsham, G. (1995). The emergence of interpretivism in IS research. *Information systems research*, 6:4(December, 1995), 376-394.
- Willis, P. (1977). *Learning to labour: How working class kids get working class jobs* Saxon House, Farnborough.

PERBANDINGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH

Meita Santi Budiani

Program Studi Psikologi Universitas Negeri Surabaya

e-mail: ita_peha@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini dibuat untuk membandingkan antara pengelolaan sumber daya manusia dari organisasi pemerintah dan non pemerintah. Data mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada organisasi pemerintah diperoleh dari BPOM Jakarta melalui literatur dan disertai data pendukung dari hasil wawancara terhadap Kabag kepegawaian BPOM dan Pemprov DKI tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesamaan di antara keduanya, yaitu penekanan pada peningkatan efisiensi, efektivitas kerja, serta garis besar pengelolaan SDM, seperti fungsi dan kewajiban tenaga kerja, dan penekanan pada kinerja dan kompetensi tenaga kerja. Adapun perbedaannya antara lain dalam hal sumber dana pelaksanaan pengelolaan SDM, pengelolaan SDM yang spesifik, seperti masalah kenaikan pangkat dan pemutusan hubungan kerja, serta struktur organisasi..

Kata kunci: Persepsi kualitas layanan, minat membeli, konsumen.

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya ini perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar, karena perkembangan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada.

Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan karirnya. Dalam suatu perusahaan, masalah tersebut sudah menjadi hal yang umum, sehingga jika banyak pegawai yang sebenarnya secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja, hal tersebut dapat disebabkan kondisi psikologis dari jabatan yang tidak cocok, atau lingkungan tempat kerja tidak membawa rasa aman bagi

dirinya. Jika hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pengusaha atau pemimpin perusahaan.

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan manusia sebagai tenaga kerja, seringkali memerlukan keahlian khusus, sehingga bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia semakin pesat perkembangannya, salah satunya melalui penelitian dan wacana, yang diterapkan secara praktis dalam organisasi atau perusahaan.

Wardhana dalam Munandar (2001) mengatakan bahwa istilah sumber daya manusia (SDM) mencakup semua energi, ketrampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat. Munandar (2001) juga melihat bahwa dalam memandang manusia sebagai tenaga kerja, pendekatan SDM melihat manusia sebagai makhluk yang menghendaki perkembangan, manusia yang menginginkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuannya dan sebagai makhluk yang berhasrat mengaktualisasikan dirinya. Terdapat beberapa definisi yang dapat menjelaskan mengenai apa itu pengelolaan

Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks bisnis, adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber Daya Manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen Sumber Daya Manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer, mengenai aspek-aspek Sumber Daya Manusia dari Manajemen Kerja. Tidak ada definisi yang sama tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Tiga (3) definisi sebagai perbandingan dapat dikemukakan.

Menurut Amstrong (1994), MSDM adalah bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Kenooy (1990), mengemukakan manajemen SDM sebagai suatu metode memaksimalkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan MSDM ke dalam strategi bisnis. Sedangkan Storey (1995) menyatakan MSDM sebagai suatu pendekatan yang khas, terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif, melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja yang mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi, struktural, dan teknik-teknik personel (dalam Dessler, 1997; Klieman, 2000).

Terdapat berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi/perusahaan. Menurut Cherrington (1983) dalam Thornton (1992), Pengelolaan Sumber Daya Manusia memiliki beberapa fungsi di dalam organisasi, antara lain adalah: Rekrutmen (*Recruitment*), Seleksi (*Selection*), Penempatan (*Placement*), Pelatihan dan Pengembangan (*Training and Development*),

Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*), Pengembangan Organisasi (*Organization Development*), Perencanaan SDM (*Human Resources Planning*), Promosi dan Mutasi Karyawan (*Promotion and Transfer*), dan Layoffs

Rekrutmen (*Recruitment*). Dalam rekrutmen, pengelola SDM bertugas untuk menjaring individu-individu berbakat untuk menempati posisi-posisi yang dibutuhkan di dalam organisasi/perusahaan. Sumbernya dapat diperoleh dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi.

Seleksi (*Selection*). Pada proses seleksi, fungsi dari pengelolaan SDM adalah memutuskan dari sejumlah kandidat, mana yang akan terpilih dan mana yang tidak diterima untuk menempati posisi yang tersedia di organisasi.

Penempatan (*Placement*). Pada penempatan, pengelola SDM bertugas menempatkan seorang pekerja di posisi yang sesuai dengan kompetensi dan aspek-aspek yang dimilikinya. Selain itu juga harus memperhatikan kemungkinan apakah orang yang bersangkutan dapat berkembang di posisi tersebut.

Pelatihan dan Pengembangan (*Training and Development*). Dalam proses pelatihan dan pengembangan, pengelolaan SDM berfungsi untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada karyawan mengenai ketrampilan, kemampuan, karakteristik atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh individu berkaitan dengan tercapainya efektifitas organisasi.

Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*). Pengelolaan SDM juga berfungsi untuk mengatur dan membuat prosedur dalam rangka mengevaluasi kinerja karyawannya.

Pengembangan Organisasi (*Organization Development*). Dalam pengembangan organisasi, pengelolaan SDM berfungsi untuk menciptakan prosedur untuk meningkatkan efektifitas suatu departemen atau divisi di dalam organisasi atau organisasi secara keseluruhan.

Perencanaan SDM (*Human Resources Planning*). Pengelola SDM juga harus mampu meramalkan tuntutan yang akan terjadi serta meramalkan kompetensi-kompetensi yang nantinya harus dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga dapat dilakukan pengembangan / tindakan perencanaan sejak dini.

Promosi dan Mutasi Karyawan (*Promotion and Transfer*). Dalam promosi dan mutasi karyawan, pengelolaan SDM berfungsi untuk menempatkan tenaga kerja yang dinilai sesuai pada pekerjaan baru dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dan jenis pekerjaan yang lebih kompleks dan kompensasi yang lebih baik (kenaikan jabatan). Selain itu pengelolaan SDM juga berfungsi untuk menilai dan mengatur prosesnya jika ada karyawan yang memiliki minat bekerja di divisi lain atau di lokasi lain.

Layoffs. Pengelola SDM juga berfungsi untuk mengatur serta menentukan pekerja mana yang tidak akan dipertahankan dan pekerja mana yang akan dipertahankan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah

Organisasi pemerintah adalah organisasi yang bergerak dan bekerja untuk pemerintah demi kepentingan negara dan masyarakat dalam hal ini pemerintah, negara dan masyarakat Indonesia. Organisasi ini merupakan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara yang terdiri dari departemen dan non departemen. *Resources* untuk operasional dari lembaga atau institusi pemerintah adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, termasuk juga sumber daya manusia di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan yang notabene merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia, diketahui bahwa sumber dana untuk biaya operasional institusi-institusi pemerintah berasal dari

APBN atau APBD. Termasuk juga untuk pembayaran imbal jasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja untuk institusi pemerintahan tersebut. Selain itu terlihat juga bahwa kebanyakan organisasi pemerintah memiliki struktur organisasi yang bersifat birokrasi dengan kewenangan yang terpusat dengan jarak kontrol yang sempit serta adanya proses pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando (keputusan yang diambil oleh bagian organisasi yang lebih rendah, harus mendapat persetujuan dari bagian atasnya).

Dalam organisasi dengan struktur birokrasi ini dapat bekerja tenaga-tenaga yang tidak perlu memiliki kompetensi dan kemampuan yang tinggi, karena pelaksanaan tugas sudah mengikuti peraturan-peraturan yang telah diformalisasi dan distandarisasi.

Selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lain baik yang berupa uang maupun bukan uang seperti tunjangan kesehatan (melalui ASKES), tunjangan beras (dalam bentuk uang) dll (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008).

Hadiat (2005) menyebutkan bahwa rigiditas atau kekakuan struktural yang cenderung birokratis mewarnai lembaga litbang (penelitian dan pembangunan) pemerintah dan pada kondisi tertentu memasung kemandirian dan kreativitas. Kondisi tersebut berakibat kurang kondusifnya iklim inovasi dan kemandegan kemampuan (*ide capacity*), sehingga produktivitas institusi litbang tidak optimal. Kekakuan tersebut muncul berkaitan dengan aturan main kelembagaan pemerintah dan sistem pengelolaan anggaran yang berdampak pada rutinitas kerja institusi litbang.

Pengelolaan manajemen pada organisasi/institusi pemerintah lebih diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdayaguna (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008). Secara khusus, pengelolaan SDM (Pegawai Negeri Sipil) di institusi/organisasi pemerintah adalah

keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

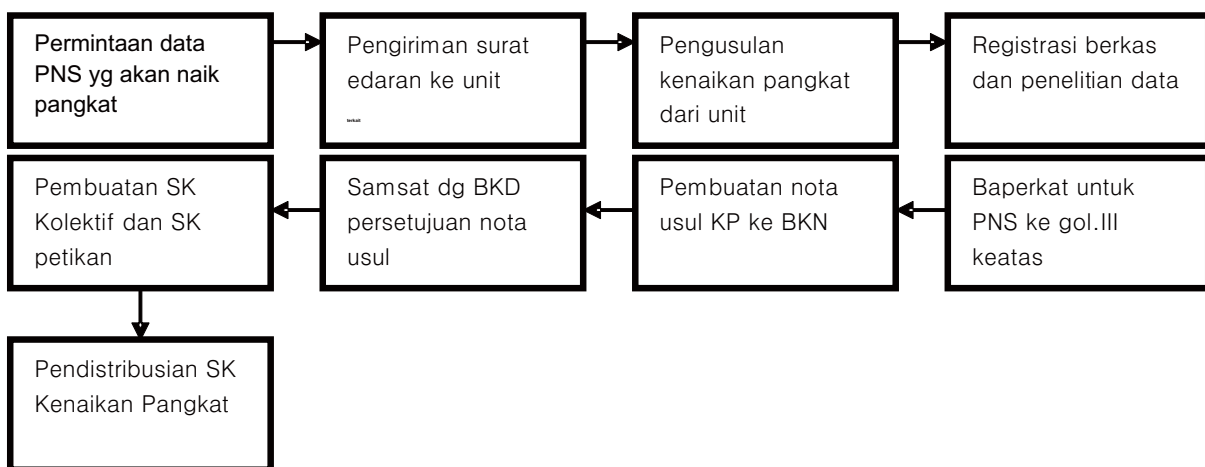
Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008 menyebutkan bahwa pengelolaan SDM di pemerintahan mengacu pada salah satunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelolaan SDM aparatur pemerintah dilaksanakan dengan basis kinerja. Kinerja ini ditampilkan sebagai hasil sinergi dari *skill*, *knowledge* (pengetahuan), dan *attitude* (perilaku) yang akhirnya membentuk *personal qualities* (kualitas pribadi) serta terkait erat dengan kompetensi. Kualitas pribadi inilah yang nantinya akan mengarah pada kinerja yang terbaik.

dilihat di Gambar 1.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, diketahui bahwa kenaikan pangkat bagi PNS secara otomatis terjadi setiap 4 tahun sekali. Sehingga sulit untuk memotivasi kinerja PNS dari segi kenaikan pangkat. Karena secara otomatis pun, seiring dengan berjalannya waktu, kenaikan pangkat itu juga akan tetap terjadi.

Untuk memotivasi kinerja pegawainya, institusi pemerintah memberikan penghargaan-penghargaan baik dalam bentuk uang maupun bukan. Salah satu kriteria pemberian penghargaan ini berdasarkan penilaian kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Walaupun menurut (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008) penilaian tersebut belum cukup efektif karena hasil penilaian rata-rata dari seluruh pegawai

Gambar 1. Prosedur Kenaikan Pangkat



Prosedur kenaikan pangkat pada institusi dan organisasi pemerintah juga terlihat melalui prosedur yang panjang. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008), bahwa prosedur itu harus melalui 9 tahapan untuk memperoleh kenaikan pangkat. Tahapan tersebut dapat

menunjukkan hasil jauh di atas rata-rata, sehingga dinilai masih belum objektif, tetapi dengan memperbaiki prosedur penilaian kinerja yang ada, kemungkinan besar cara ini akan mampu meningkatkan kinerja pegawai di institusi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, diketahui bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja pada PNS lebih sulit untuk dilakukan. Hal ini juga ditambahkan oleh (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008) mengenai jenis hukuman terhadap PNS apabila mereka melakukan pelanggaran mengacu pada PP NOMOR 30 tahun 1980. Jenis hukuman terdiri dari hukuman disiplin ringan, yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis; hukuman disiplin sedang, yang berupa penundaan kenaikan gaji (1 tahun), penurunan gaji (1X) kenaikan berkala (1X), penundaan kenaikan pangkat (1 tahun); hukuman disiplin berat, yang berupa penurunan pangkat <1 tingkat (1 tahun), pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu (Kabag Kepegawaian Pemprov DKI, 2008) juga menyebutkan bahwa apabila ada PNS yang masuk penjara tidak sampai 4 tahun lamanya, pada saat dibebaskan ia masih dapat bergabung di institusi pemerintahan tempat ia bekerja sebelumnya.

Kabag Kepegawaian Pemprov DKI (2008) juga mengatakan bahwa pengelolaan SDM di institusi pemerintahan sangat terkait erat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti contoh yang disebutkan bahwa untuk posisi tertentu seperti Dinas lalu lintas, Pemprov DKI hanya memerlukan pegawai dengan status kontrak (karena posisi tersebut hanya membutuhkan tenaga yang kuat dan muda), pengelola SDM sudah merancang *planning* SDM yang akan menempati posisi tersebut. Tetapi karena kebijakan pemerintah mengatakan bahwa semua pegawai dengan status kontrak harus diangkat menjadi tetap, maka pengelola SDM Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk mencari posisi bagi pegawai-pegawai yang sudah berkurang tenaganya dan tidak produktif lagi di posisi tersebut. Atau jika mereka tetap dikaryakan untuk jabatan tersebut, akan sulit bagi mereka untuk

memberikan hasil kerja yang baik. Dari sini terlihat bahwa pengelola SDM akan sulit melakukan PHK bagi PNS yang dianggap bermasalah dan tidak dapat begitu saja melepas PNS yang tidak lagi baik performa kerjanya.

Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan BPOM juga mengatakan bahwa di dalam institusi pemerintahan, terdapat perserikatan yang dinamakan KORPRI (Korps Pegawai Negeri). Perserikatan ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dari para pegawai mengenai kondisi kerja mereka. Tetapi pada kenyataannya KORPRI sendiri kurang berperan aktif untuk menyalurkan aspirasi pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDM di instansi/organisasi pemerintahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Sumber dana untuk operasional dan penggajian karyawan berasal dari APBN/APBD
- Terdapat tunjangan-tunjangan di luar penggajian
- Struktur organisasi yang digunakan bersifat kaku dan birokratif sehingga pegawai kurang mendapatkan stimulasi untuk menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- Pengelolaan SDM-nya berbasis pada kinerja dan kompetensi
- Kenaikan pangkat secara otomatis terjadi setiap 4 tahun sekali, dengan tahapan pengajuan kenaikan pangkat yang terbilang panjang dan kurang efisien
- Instansi pemerintah sulit untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan yang bermasalah dan tidak lagi produktif. Salah satu persyaratan PHK adalah apabila pegawai menjalankan hukuman penjara minimal 4 tahun.
- Dalam pengelolaan SDM, perturan pemerintah memiliki peran kuat dan langsung.

Pengelolaan SDM di Organisasi Non Pemerintah

Organisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (tanpa bertujuan memperoleh keuntungan) dari kegiatannya (Layanan Swadaya Masyarakat/LSM). Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut.

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
2. Dalam melakukan kegiatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba) atau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa mengharapkan keuntungan (non profit)
3. Organisasi non pemerintah dapat bergerak di berbagai bidang kehidupan. Seperti contohnya perbankan, hukum, manajemen dan lain-lain.

Berbeda dengan organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah atau biasa disebut dengan organisasi swasta memiliki sumber dana untuk operasional perusahaannya dari *stakeholder* atau pemegang saham. *Stakeholder* disini bisa 1 orang atau lebih. Bahkan beberapa organisasi swastapun sudah memiliki saham terbuka, dimana saham tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat. Dalam pengelolaan SDMnya, biaya untuk operasional SDM dan penggajian karyawan berasal dari dana yang sudah direncanakan untuk divisi SDM tersebut setiap tahunnya. Nominal dana ini dirapatkan oleh jajaran direktur selaku manajemen perusahaan. Selain gaji yang rutin, ada juga bonus-bonus yang diberikan seperti bonus akhir tahun (diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan pada perusahaan) dan tunjangan-tunjangan seperti kesehatan dan lain-lain.

Struktur organisasi pada perusahaan swasta ini biasanya lebih bervariasi dibandingkan dengan struktur yang ada di

permerintahan. Walaupun begitu, pengelolaan SDM di perusahaan swasta ini juga memberikan penekanan pada kinerja karyawan. Sudah banyak organisasi non pemerintah yang melakukan penilaian kinerja karyawannya dengan cukup objektif. Penilaian ini akan mengacu kepada imbal jasa atau kenaikan pangkat yang akan diperoleh karyawan yang bersangkutan. Dengan prosedur yang dijalankan ini, dapat dikatakan bahwa akan lebih mudah memotivasi karyawan pada organisasi non pemerintah dari pada memotivasi karyawan pada organisasi pemerintah.

Untuk status karyawan hampir sama dengan organisasi pemerintah (ada yang tetap dan ada yang kontrak). Perbedaannya adalah, akan lebih mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan perusahaan swasta karena biasanya perusahaan-perusahaan swasta memiliki prosedur penilaian kinerja yang ketat. Apabila terdapat pelanggaran kecil bisa jadi karyawan tersebut mendapat surat peringatan. Surat peringatan yang diberikan beberapa kali hingga limit tertentu dapat membuat si karyawan mengalami PHK. Alasan terjadinya PHK sebagian besar karena karyawan tersebut dianggap tidak memiliki dan tidak menunjukkan performa kerja yang baik.

Banyak hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan SDM di organisasi swasta. Hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan SDM di organisasi swasta antara lain seperti perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, Serikat Pekerja dan lain-lain.

Di jaman yang serba instan dan cepat ini, organisasi non-pemerintah harus mampu melakukan penyesuaian besar-besaran dan menjadi lebih fleksibel sehingga tidak tenggelam dalam persaingan. Berbeda dengan organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah/swasta harus mampu bertahan dan terus berkembang, karena jumlah organisasi non pemerintah juga semakin banyak.

Secara garis besar, pengelolaan SDM di organisasi non pemerintah sama dengan pengelolaan SDM yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan SDM tersebut mencakup rekrutmen (*recruitment*), seleksi (*selection*), penempatan (*placement*), pelatihan dan pengembangan (*training and development*), penilaian kinerja (*performance appraisal*), pengembangan organisasi (*organization development*), perencanaan SDM (*human resource planning*), promosi dan mutasi karyawan (*promotion and transfer*) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDM pada organisasi non pemerintah adalah:

- Sumber dana untuk operasional dan penggajian karyawan berasal dari *Stakeholder* atau pemegang saham
- Terdapat tunjangan-tunjangan di luar penggajian
- Struktur organisasi yang lebih bervariasi
- Pengelolaan SDM-nya berbasis pada kinerja dan kompetensi
- Kenaikan pangkat berdasarkan penilaian kinerja
- Dasar Pemutusan Hubungan Kerja lebih mudah dibandingkan pada organisasi pemerintah.

Dalam pengelolaan, perturan pemerintah memiliki pengaruh, tetapi hal yang menjadi fokus utama lebih kepada bagaimana organisasi dapat bertahan di tengah persaingan.

Perbandingan Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah (Swasta)

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan SDM di organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Persamaan antara pengelolaan SDM di organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah adalah garis besar proses

pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dari pelaksanaan tugas/pekerjaan, fungsi dan kewajiban tenaga kerja, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pengelolaan SDM ini juga sama-sama menekankan pada kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

Selain persamaan, terdapat juga perbedaan antara pengelolaan SDM di organisasi pemerintah dan pengelolaan SDM di organisasi swasta. Perbedaannya antara lain:

- Sumber dana dalam pelaksanaan pengelolaan SDM. Untuk organisasi pemerintah, sumber dana berasal dari dana APBN/APBD, sementara untuk organisasi swasta, sumber dana berasal dari pemegang saham.
- Struktur organisasi yang menaungi pengelolaan SDM juga terlihat berbeda. Sebagian besar organisasi pemerintah memiliki struktur organisasi yang kaku dan bersifat birokrasi, sementara bagi organisasi swasta, sifat dari struktur organisasinya lebih bervariasi. Kondisi struktur kerja yang kaku dan birokratis dapat memasung kreativitas berpikir dari tenaga kerja yang berkerja di dalam organisasi tersebut.
- Dalam hal kenaikan pangkat, organisasi pemerintah lebih menekankan pada lama bekerja (secara otomatis pangkat akan naik setelah 4 tahun). Sementara bagi organisasi swasta, kenaikan pangkat lebih pada penilaian kinerja. Dari sini dapat terlihat bahwa dalam rangka memotivasi kinerja pegawai organisasi pemerintah akan sulit dilakukan melalui prosedur kenaikan pangkat ini.
- Untuk proses Pemutusan hubungan kerja, akan lebih sulit bagi organisasi pemerintah untuk melakukan hal ini, karena walaupun

karyawan sudah dianggap tidak lagi produktif, karyawan tersebut dapat diberikan semacam peringatan atau pelatihan. Akan sangat sulit bila harus memberhentikan tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal. Sementara untuk organisasi swasta, akan lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja

apabila karyawan sudah diberikan surat peringatan beberapa kali (sesuai dengan jumlah dalam prosedur yang berlaku) karena tindak indisipliner atau kinerja yang kurang, maka perusahaan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, G. (1997). *Human Resources Management*. Prentice Hall, New Jersey
- Hadiat (2005). Membangkitkan Institusi Litbang () diakses Juni, 2008
- Kepala Bagian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (2008). dalam kuliah Kapita Selekta dengan topik Pengelolaan SDM di Pemprov DKI Jakarta.
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, (2008).
- Kleiman, L.S. (2000). *Human Resources Management*. South Western College Publishing.
- Munandar A.S. (2001). Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bagian PIO Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.
- Munandar A.S. (2004). Psikologi Industri dan Organisasi. Bagian PIO Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok
- Nasution, M. (2000). Manajemen Personalia ; Aplikasi dalam Perusahaan. Djambatan, Jakarta.
- Thornton, G.C. (1992). *Assessment Centers in Human Resources Management*. Addison-Wesley Publishing Company, Colorado.

Petunjuk Penulisan Naskah

1. Naskah merupakan karya asli yang belum pernah dimuat di media lain.
2. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Naskah diketik 1,5 spasi, Times New Roman font 12, ukuran A4, dengan panjang naskah 10-19 halaman.
4. Sistematika penyusunan naskah hasil penelitian kuantitatif sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Nama Penulis (tanpa gelar) disertai alamat e-mail dan lembaga asal penulis
 - c. Abstraksi, ditulis dengan spasi tunggal, font 11 Times New Roman, dengan panjang 75-150 kata (dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - d. Kata kunci (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - e. Isi yang terdiri dari :
 - (1). Pendahuluan (boleh dengan subjudul)
 - (2). Metode penelitian
 - metode
 - sampel (dijelaskan teknik sampling-nya; pada eksperimen menggunakan istilah 'partisipan')
 - prosedur (hanya untuk eksperimen)
 - teknik pengumpulan data
 - teknik analisis data
 - (3). Hasil dan Pembahasan
 - hasil
 - pembahasan
 - (4). Simpulan dan Saran (jika tidak ada saran, maka hanya 'Simpulan')
 - f. Daftar Pustaka (mengikuti contoh di lembar terpisah)
5. Sistematika penyusunan naskah hasil penelitian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Judul
 - b. Nama Penulis (tanpa gelar) disertai alamat e-mail dan lembaga asal penulis
 - c. Abstraksi ditulis dengan spasi tunggal, font 11 Times New Roman, dengan panjang 75-150 kata (dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - d. Kata kunci (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - e. Isi yang terdiri dari :
 - (1). Pendahuluan (boleh dengan subjudul)
 - (2). Metode penelitian
 - metode
 - partisipan (dijelaskan kriteria pemilihan dan cara perekrutan subjek)
 - teknik pengumpulan data
 - teknik analisis data
 - (3). Hasil dan Pembahasan
 - (4). Simpulan dan Saran (jika tidak ada saran, maka hanya 'simpulan')
 - f. Daftar Pustaka (mengikuti contoh di lembar terpisah)

6. Naskah kajian pemikiran berisi tentang ulasan isu mutakhir yang belum/jarang dibahas secara teoritis atau mereviu konsep-konsep teoritis yang belum tuntas atau masih problematik. Naskah kajian pemikiran menggunakan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Nama Penulis (tanpa gelar) disertai alamat e-mail dan lembaga asal penulis
 - c. Abstraksi, ditulis dengan spasi tunggal, font 11 Times New Roman, dengan panjang 75-150 kata (dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - d. Kata kunci (ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
 - e. Isi yang terdiri dari :
 - (1). Pendahuluan (merumuskan permasalahan isu mutakhir/konsep teoritis yang belum tuntas dan menjelaskan strategi pembahasannya)
 - (2). Pembahasan (berisi beberapa sub-judul sesuai dengan kebutuhan)
 - (3). Simpulan dan Saran (kalau tidak ada saran berarti hanya 'simpulan')
 - f. Daftar Pustaka (mengikuti contoh di di lembaran terpisah)
7. Penulisan daftar pustaka sesuai dengan standar APA (diuraikan dalam lembar terpisah)
8. Penomoran tabel, grafik atau diagram dan gambar.

Semua tabel, grafik atau diagram, dan gambar yang terdapat pada artikel diberi nomor urut dengan angka Arab di bagian atasnya. Nomor-nomor tersebut harus berurutan. Nomor tabel diurutkan sesuai jumlah tabel, begitu juga nomor diagram diurutkan sebanyak diagram yang ada dalam artikel. Penomoran grafik dan gambar mengikuti aturan yang sama.

Contoh: Tabel 1.
 Gambar 1.
 Tabel 2.
 Gambar 2.
 dst.
9. Naskah dapat dikirim dalam bentuk soft copy (MS Word) atau print-out ke alamat redaksi: Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60215 Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112. Atau melalui e-mail: syafiq_muh@yahoo.com. CP: Muhammad Syafiq, HP. 081330114338.

CARA PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

- ♦ Sumber referensi dari jurnal yang terbit secara berkala
Howarth, Caroline (2002). Identity in Whose Eyes?: The Role of Representations in Identity Construction. *Journal for the theory of social behaviour*, 32(2), 145-162.
 - ♦ Sumber referensi dari jurnal (2 penulis):
McCoy, S.K., & Major, B. (2003). Group identification moderates emotional responses to perceived prejudice. *Personality and Social Psychological Bulletin*, 29, 1005-1017.
 - ♦ Sumber referensi dari jurnal (kurang dari 6 penulis):
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child program for children of divorce. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68, 843-856.
- Ket: Jika jumlah penulis lebih dari 6 dalam satu sumber, yang berikutnya gunakan et al.
- ♦ Sumber referensi dari jurnal di surat kabar:
Zukerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: does facial prominence imply dominance? *Journal of Personality and Social Psychology*.
 - ♦ Sumber referensi dari majalah dan Koran yang ada penulisnya:
Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. *Science*, 290, 1113-1120.
 - ♦ Sumber referensi dari Artikel Koran yang tidak ada penulisnya:
The new health-care lexicon. (1993, August/September). *Copy Editor*, 4, 1-2.
 - ♦ Sumber referensi dari berita online yang tidak ada penulisnya:
BBC Online. (2011). Indonesia 'suicide bomber' wounds 28 in mosque blast. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13090306>.
 - ♦ Sumber dari laman internet:
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from <http://www.alistapart.com/articles/writeliving>
 - ♦ Sumber Referensi yang memiliki no issue dan no seri:
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child program for children of divorce. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58(1, Serial No. 231).
 - ♦ Sumber Referensi dari Jurnal Tambahan(Supplement):
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child program for children of divorce. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 24(Suppl. 2), 4-14
 - ♦ Sumber referensi dari Buku:
Horgan, John (2009). Walking Away From Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements. *London: Routledge*.

- ♦ Sumber referensi dari buku yang diedit dan penulis tiap bab nya berbeda:
Smith, J. A. and Eatough, V. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis. In E. Lyons And A. Coyle (Eds.). *Analysing Qualitative Data in Psychology* (pp. 35-50). London: Sage.
- ♦ Sumber referensi dari buku edisi ketiga dan nama penulis dengan tambahan Jr. (junior):
Mitchell, T. R. & Larson, J. R., Jr. (1987). *People in organizations: An introduction to organizational behavior* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- ♦ Sumber dari buku yang telah diedit:
Mitchell, T. R. & Larson, J. R. (Eds.). (1987). *People in organizations: An introduction to organizational behavior*. New York: McGraw-Hill.
- ♦ Sumber dari buku yang direvisi:
Beck, C. A. J., Sales, B. D. (2001). *Family mediation: Fact, myths, and future prospects* (Rev. ed.). Washington, DC: American Psychology Association.
- ♦ Sumber dari buku tidak disertai nama penulis dan editor:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Meriam-Webster.
- ♦ Sumber dari ensiklopedia atau kamus:
Sadie, S. (Ed.). (1980). *The new Grove dictionary of music and musicians* (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan.
- ♦ Sumber dari Brosur:
Research and Training Centre on Independent Living. (1993). *Guidelines of reporting and writing about people with disabilities* (4th ed.) [brochure]. Lawrence, KS: Author.
- ♦ Sumber dari rekaman suara:
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). *Personality, continuity, and changes of adult life* (Cassette Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association.
- ♦ Sumber dari rekaman video:
Capra, F. (Director & Producer). (1999). *It happened one night* [videocassette].
- ♦ Sumber referensi dari majalah dan Koran yang ada penulisnya:
Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. *Science*, 290, 1113-1120.
- ♦ Sumber referensi dari Artikel Koran yang tidak ada penulisnya:
The new health-care lexicon. (1993, August/September). *Copy Editor*, 4, 1-2.
- ♦ Sumber referensi dari berita online yang tidak ada penulisnya:
BBC Online. (2011). Indonesia 'suicide bomber' wounds 28 in mosque blast. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13090306>.
- ♦ Sumber dari laman internet:
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. *A List Apart: For People Who Make Websites*, 149. Retrieved from <http://www.alistapart.com/articles/writeliving>.

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya